



Swantara

Majalah Triwulan Lemhannas RI No. 53 Juni 2025

Seputar Kita

Hilirisasi Menjadi Langkah
Indonesia Menuju Negara
Maju

Profil Pejabat

Brigjen Pol. Udin Zainudin, S.I.K.,
M.H.: "...jaga etika, saling hormat,
dan jangan anggap diri lebih tinggi..."

Opini

Kepemimpinan Inklusif dan
Transformasional Dalam
Mengoptimalkan Potensi Digital
Nomadis di Era Bonus Demografi



Versi Digital

**JAKARTA GEOPOLITICAL FORUM IX/2025:
MENJAWAB FRAGMENTASI
GEOEKONOMI DAN KETAHANAN ENERGI
DI TENGAH KETIDAKPASTIAN GLOBAL**

Ayo Sampaikan
**Aspirasi & Pengaduan
Pelayanan Publik**

Anda melalui:



TENTANG L

www.lapor.go.id



MASUK

DAFTAR

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Sampaikan laporan Anda langsung kepada instansi pemerintah berwenang

Sampaikan Laporan Anda

Pilih Klasifikasi Laporan

PENGADUAN

ASPIRASI

LAYANAN INFORMASI

Perhatikan Cara Menyampaikan Pengaduan Yang P





PELINDUNG ACE HASAN SYADZILY

PEMBINA EDWIN

PENGARAH R. Z. PANCA PUTRA S.

PENANGGUNGJAWAB/PEMIMPIN REDAKSI

MIRZA AGUS

REDAKTUR HENDRA SETIAWAN

PENYUNTING/EDITOR BAMBANG IMAN ARYANTO,

CAHYAQADRI HILDAMONA

DESAIN GRAFIS ARINI MAULIDIA

FOTOGRAFER ANGGA MITRA TAMA

SEKRETARIAT MAGISTA DIAN FITRILIA, GATOT, AIDHA

SAHLA ADIWIDYA, DWI ARIYANI, DEANNISA SAVITRI

PENULIS ARTIKEL MAULIDA ARBANINGSIH,

NAOMI AUGUSTINA, SUCITRA PUTERI RACHMAN

**ALAMAT REDAKSI BIRO HUMAS LEMHANNAS RI
JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA 10110**

Telp. (021) 3832470

Email: redaksihumaspubbit@gmail.com

Instagram: @lemhannas_ri

Facebook: @lembagaketahanannasionalri

Twitter: @LemhannasRI

Youtube: Lemhannas RI

TikTok: @lemhannas_ri

ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN

**SWANTARA MENERIMA ARTIKEL DAN OPINI DARI LUAR
LEMHANNAS RI DAN AKAN DIMUAT APABILA SESUAI
DENGAN KEBIJAKAN REDAKSI**

Salam Redaksi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Shalom

Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan

Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Majalah Swantara Edisi 53, Juni 2025 telah terbit di tengah-tengah kita. Tim Redaksi Majalah Swantara terus berupaya maksimal dalam menyajikan berbagai informasi pilihan dalam berbagai rubrik. Diharapkan berbagai sajian informasi dalam Majalah Swantara ini dapat memberikan sudut pandang baru yang membuka wawasan dan pengetahuan pembaca.

Untuk Laporan Utama pada edisi kali ini, dibahas terkait Fragmentasi Geoekonomi dan Ketahanan Energi di Tengah Ketidakpastian Global yang juga merupakan tema dalam Jakarta Geopolitical Forum ke-9. Seperti diketahui ekonomi global tengah mengalami transformasi mendasar, didorong oleh investasi masif pada energi terbarukan dan pergeseran kekuatan antarnegara. Pergeseran ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, kerentanan rantai pasok, serta penggunaan energi sebagai alat tekanan politik. Konflik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung, eskalasi antara Israel dan Iran, serta ketidakstabilan di Selat Hormuz, semuanya berkontribusi pada ketidakpastian global, lonjakan harga energi, dan gangguan rantai pasok dunia.

Pada rubrik Seputar Kita, kali ini kami menyajikan informasi terkait ide, gagasan, dan informasi terkait berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Lemhannas RI. Sementara rubrik profil mengangkat profil pejabat Lemhannas RI yang baru saja dilantik dan pegawai yang menjadi teladan di Lemhannas RI sehingga bisa mengenal lebih dekat dan menjadi inspirasi bagi pembaca. Selain itu, tim redaksi juga menyajikan berbagai rubrik seperti Opini, Hot News dan Ragam yang bisa menjadi pilihan referensi untuk menambah khazanah pengetahuan bagi pembaca setia Majalah Swantara.

Tim redaksi menyadari bahwa Majalah Swantara masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, redaksi mengharapkan adanya saran dan masukan dari para pembaca, demi eksistensi serta kemajuan karya jurnalistik yang disajikan pada edisi-edisi berikutnya.

Tim redaksi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berperan dalam membantu terbitnya Majalah Swantara Edisi 53, Juni 2025. Semoga, Majalah Swantara bisa memberikan banyak manfaat serta berkesan di hati para pembaca. *Grandescunt aucta labore!*

Om Shanti Shanti Shanti Om

Namu Buddhaya

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Daftar Isi

6 LAPORAN UTAMA JGF IX/2025: Menjawab Fragmentasi Geoekonomi dan Ketahanan Energi di Tengah Ketidakpastian Global

SEPUTAR KITA



14 Hilirisasi Menjadi Langkah Indonesia Menuju Negara Maju

16 Seratus Dosen, Guru, dan Widyaiswara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Mendapatkan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dari Lemhannas RI



18 HUT Lemhannas RI ke-60: Menjemput Masa Depan dengan Ketahanan Strategis Bangsa

20 Memasuki Usia ke-60 Tahun, Lemhannas RI Terus Mengenang Jasa Para Patriot Bangsa



22 Rotasi Sejumlah Pejabat di Lemhannas RI Sebagai Wujud Penyegaran Organisasi

23 Sestama Lemhannas RI Memberikan Pengenalan Lembaga kepada Peserta P3N Angkatan 25

SEPUTAR KITA



- 24 Menkomdigi RI: Menjaga Ruang Digital yang Sehat, Aman, Produktif, dan Berdaulat Harus Menjadi Prioritas dan Tugas Bersama
- 26 Pertemuan Wakil Gubernur dengan Tenaga Profesional untuk Tingkatkan Kerja Sama
- 27 Seluruh Personel Lemhannas RI Peringati Hari Lahir Pancasila



- 28 Gubernur Lemhannas RI Terima Audiensi Ketua Umum Kadin Indonesia
- 30 Lemhannas RI Dukung Penguatan Kepemimpinan Daerah Melalui Manunggal Leadership Retreat 2025 di Jawa Tengah

OPINI



- 32 Konsepsi Cadangan Pangan Nasional di Seluruh Wilayah NKRI Guna Menyiapkan Ketersediaan Pangan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Antisipasi di Masa Perang) Dalam Rangka Memenangkan Peperangan Dengan Bangsa Agresor
- 36 Kepemimpinan Inklusif dan Transformasional Dalam Mengoptimalkan Potensi Digital Nomadis di Era Bonus Demografi
- 39 Geoekonomi Trump 2.0: Bagaimana Langkah Strategis Indonesia?

PROFIL PEJABAT



- 41 **Brigjen Pol. Udin Zainudin, S.I.K., M.H.:** "...jaga etika, saling hormat, dan jangan anggap diri lebih tinggi..."

PROFIL PEGAWAI



- 44 **Sundari:** ASN Harus Terus Beradaptasi dengan Perubahan

HOT NEWS



- 46 Paus Fransiskus Meninggal Dunia, Gereja Katolik Menuju Masa Depan di Bawah Paus Leo XIV
- 47 Indonesia Resmikan Proyek Baterai Kendaraan Listrik Terbesar di Asia Tenggara

RAGAM



- 48 Rinjani: Dunia yang Menyimpan Keajaiban
- 49 Anggrek Hantu: Permata Gaib dari Rimba Nusantara

SUARA PESERTA



- 50 Membangun Ketahanan Bangsa Melalui Pendidikan P4N: Perspektif Kombes Pol Budiman Bostang Panjaitan S.H., S.I.K., M.H.



- 52 GALLERY

JAKARTA GEOPOLITICAL FORUM IX/2025: MENJAWAB FRAGMENTASI GEOEKONOMI DAN KETAHANAN ENERGI DITENGAH KETIDAKPASTIAN GLOBAL

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) kembali menyelenggarakan Jakarta Geopolitical Forum ke-9 (JGF IX/2025) pada 24-25 Juni 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta. Dalam JGF IX/2025 ini, "Fragmentasi Geoekonomi dan Ketahanan Energi" menjadi tema utama dalam menyikapi kontestasi perimbangan kekuatan global yang semakin intensif dan penuh dengan perdebatan.

Sejak pertama kali digelar pada tahun 2017, Jakarta Geopolitical Forum (JGF) telah menjadi wadah utama pertukaran gagasan terkait isu-isu geopolitik dan strategis yang krusial, serta memperkuat dialog antar pemangku kepentingan untuk membangun ketahanan nasional dan kawasan. Forum tahun 2025 melanjutkan tradisi ini, menghadirkan ruang diskusi yang sangat relevan dan penting di tengah disrupsi besar pada sistem ekonomi dan energi dunia.

Urgensi penyelenggaraan JGF IX/2025 tidak dapat dipandang sebelah mata. Ekonomi global tengah mengalami transformasi mendasar, didorong oleh investasi masif pada energi terbarukan dan pergeseran kekuatan antarnegara. Pergeseran ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, kerentanan rantai pasok, serta penggunaan energi sebagai alat tekanan politik. Konflik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung, eskalasi antara Israel dan Iran, serta ketidakstabilan di Selat Hormuz, semuanya berkontribusi pada ketidakpastian global, lonjakan harga energi, dan gangguan rantai pasok dunia.

Konflik Rusia-Ukraina yang memasuki tahun keempat telah memberikan guncangan besar pada pasar energi global. Eropa yang sebelumnya sangat bergantung pada minyak dan gas Rusia, kini terpaksa mempercepat transisi ke sumber energi alternatif, sementara sanksi internasional mengalihkan ekspor Rusia ke pasar Asia. Gangguan pasokan ini menyebabkan harga energi melonjak dan volatilitas meningkat, mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk meninjau ulang strategi energi mereka dan berinvestasi pada ketahanan serta diversifikasi. Badan Energi Internasional (IEA) mencatat bahwa krisis ini justru dapat mempercepat peralihan global dari bahan bakar fosil, seiring upaya negara-negara memperkuat kemandirian dan ketahanan energi.

Di saat yang sama, pecahnya konflik terbuka antara Israel dan Iran telah mengguncang pasar minyak dan gas dunia. Serangan militer dan aksi balasan telah berdampak pada infrastruktur vital, dengan potensi eskalasi lebih lanjut yang dapat mengganggu aliran energi dari Timur Tengah—wilayah kunci pasokan energi global. Ketidakpastian akibat konflik ini telah mendorong lonjakan harga minyak, mempertegas kerentanan pasar global terhadap guncangan geopolitik.

Yang tak kalah penting, Selat Hormuz—jalur sempit yang dilalui sekitar 20% minyak dan gas alam cair dunia—masih menjadi titik rawan utama bagi ketahanan energi global. Setiap gangguan atau blokade di selat ini, sebagaimana ancaman yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir, akan berdampak luas pada perekonomian dunia, mendorong harga energi naik, memicu inflasi, dan memperberat tekanan pada rantai pasok global. Alternatif jalur sangat terbatas, sehingga stabilitas Selat Hormuz menjadi krusial bagi negara pengekspor maupun pengimpor energi.

JGF IX/2025, menghadirkan empat sesi pleno utama yang dirancang untuk membedah dimensi krusial lanskap geopolitik dan energi saat ini, yaitu:

Tren Ekonomi Global dan Keseimbangan Kekuatan dalam Mendorong Kebijakan Energi Berkelanjutan: Membahas bagaimana pergeseran ekonomi global dan persaingan kepemimpinan energi bersih membentuk ulang hubungan internasional dan agenda kebijakan.

Hilirisasi, Industrialisasi, dan Ketahanan Energi dalam Merespons Perubahan Geopolitik Global: Mengupas strategi industrialisasi berbasis sumber daya, inovasi teknologi, dan pengembangan rantai pasok energi yang tangguh di tengah dinamika kekuatan global.

Relevansi Energi Terbarukan dalam Perubahan Geopolitik dan Geoekonomi Global: Menyoroti pentingnya energi terbarukan sebagai alat kemandirian energi sekaligus arena baru persaingan geopolitik.

Mengangkat peran kota sebagai pusat inovasi dan ketahanan menghadapi perubahan iklim, urbanisasi, dan guncangan ekonomi.

Sistem energi dan ekonomi dunia semakin saling terhubung—namun juga semakin rapuh. Dampak perang Rusia-Ukraina memaksa Eropa dan wilayah lain mempercepat transisi energi, berinvestasi pada energi terbarukan, dan mencari kemitraan baru untuk mengurangi ketergantungan pada sumber pasokan yang terkonsentrasi. Konflik Israel Iran serta volatilitas di Selat Hormuz menegaskan risiko nyata terhadap aliran energi global dan perlunya rantai pasok yang tangguh dan terdiversifikasi.

Di tengah tantangan ini, JGF IX/2025 berupaya mendorong kerja sama internasional, merangsang solusi kebijakan inovatif, serta memperkuat kapasitas negara dan kota untuk beradaptasi dan bertahan menghadapi guncangan di masa depan. Forum ini menegaskan pentingnya teknologi, sumber daya manusia, dan kolaborasi lintas batas dalam mendorong transisi energi dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta inklusif.

Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. berharap forum ini menjadi laboratorium gagasan dan tempat bertemunya pemikiran kritis, bukti empiris, dan visi strategis untuk memperkuat ketahanan energi di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. "Melalui diskusi lintas sektor dan rekomendasi yang bersifat operasional, kami berharap Jakarta Geopolitical Forum Tahun 2025 ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam kebijakan energi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaulat," ujarnya saat memberikan sambutan pada Pembukaan Jakarta Geopolitical Forum IX/2025.

Tren Ekonomi Global dan Keseimbangan Kekuatan dalam Mendorong Kebijakan Energi Berkelanjutan

Purnomo Yusgiantoro, Penasehat Khusus Presiden RI untuk Energi, menyatakan hanya 0,35% utilisasi potensi energi terbarukan di Indonesia yaitu sebesar 13.155 MW dari total potensi 3.687.000 MW. Potensi energi terbarukan tersebut mencakup energi panas bumi (geothermal), tenaga air (hydropower), bioenergi, tenaga angin, tenaga surya, energi laut, gasifikasi batubara, dan hingga bahan nuklir yaitu uranium. "Energi panas bumi dengan





potensi 23.966 MW baru dimanfaatkan 10,08%, sementara energi surya dengan potensi 3.294.000 MW baru dimanfaatkan 0,017%", ujar Purnomo pada pada kegiatan Jakarta Geopolitical Forum IX/2025, 24 Juni 2025 yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas RI) di Hotel Borobudur, Jakarta. Kondisi ini menunjukkan peluang besar sekaligus tantangan dalam percepatan transisi energi.

Dalam paparannya tentang "Dinamika Ekonomi Global dan Keseimbangan Kekuatan Mendukung Kebijakan Energi Berkelanjutan", Purnomo Yusgiantoro menggarisbawahi nilai strategis sektor penangkapan dan penyimpanan karbon, serta penggunaannya (Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization and Storage - CCS/CCUS). CCS/CCUS dapat menjadi komponen penting dalam strategi transisi energi di Indonesia dengan potensi sebesar 572 Gton CO₂ yang memberikan peluang prospek bisnis baru.

Pemanfaatan maksimal potensi energi terbarukan tersebut memerlukan jumlah investasi yang sangat besar sehingga perlu intervensi dan kebijakan terarah dari pemerintah. Pembicara lain di sesi yang sama pada Jakarta Geopolitical Forum IX/2025, Jordan Lee dari Tony Blair Institute for Global Change, juga menekankan pencapaian energi bersih dan penggunaan energi terbarukan memerlukan investasi dan pendanaan yang sangat besar, terutama di negara-negara ekonomi baru dan berkembang seperti Indonesia. "Sayangnya, sebagian besar investasi energi terbarukan terpusat di negara-negara maju tertentu seperti AS dan Uni Eropa, serta Tiongkok", ungkap Lee. Ini menjadi tantangan strategis

bagi negara berkembang di tengah ketidakpastian geopolitik dan fragmentasi geoekonomi saat ini.

Thomas Wagner dari Eurocham mengungkapkan, pemerintah Indonesia harus memperhatikan secara serius pengembangan sektor energi transisi dan energi bersih ini mengingat perkembangan realitas di lapangan yang masih tertinggal dari capaian target yang ditetapkan seperti target pencapaian bauran energi nasional dari energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% di 2025, tetapi realisasi capaian target tahun 2024 berada di angka 14-15%. Di tahun ini, Indonesia harus mengejar ketertinggalan sekitar 8-9%. Wagner mengatakan, tidak seperti energi fosil yang terbatas, energi terbarukan tidak terbatas. "Semakin terlambat kita memanfaatkan energi terbarukan, semakin kita tertinggal", jelas Wagner.

Lebih lanjut, Wagner menyatakan Indonesia dapat memulai dengan membangun kapasitas produksi, memanfaatkan insentif tersebut dengan memanfaatkan peluang ekspor, dan kemudian begitu ada pembeli industri atau komersial lain di dalam negeri, infrastruktur dan pasokannya sudah ada sehingga Indonesia tidak harus terus-menerus mengeksplor. Wagner juga menegaskan pentingnya dukungan penuh dan kepastian regulasi di sektor energi terbarukan.

Transisi energi berkelanjutan bukan hanya imperatif lingkungan, tetapi juga strategi geopolitik dan ekonomi yang menentukan keseimbangan kekuatan global di masa depan. Indonesia, dengan potensi sumber daya dan komitmen politiknya, memiliki

peran strategis dalam membentuk arsitektur energi global yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

Hilirisasi, Industrialisasi, dan Ketahanan Energi dalam Merespons Perubahan Geopolitik Global

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hilirisasi dan ketahanan energi adalah strategi utama Indonesia untuk menghadapi ketidakpastian geopolitik global saat ini. Dalam paparannya, Menteri Bahlil mengingatkan bahwa kondisi global saat ini sangat mencemaskan, dengan perubahan geopolitik yang terjadi sangat cepat, bahkan per hari. "Kondisi ini mulai dari tahun 2016 saat dimulai perang dagang. "Pada saat yang bersamaan, dunia dituntut untuk menguasai transisi energi," ujar Menteri Bahlil di hadapan para peserta forum. Di tengah ketidakpastian global, Menteri Bahlil menekankan pentingnya Indonesia untuk mengukur dan memaksimalkan keunggulan komparatif yang dimiliki. Menurut Bahlil, strategi pertahanan terbaik untuk menghadapi dunia yang tidak pasti adalah dengan memaksimalkan potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dan melakukan ekspansi.

Menteri Bahlil menyoroti pentingnya hilirisasi sebagai strategi fundamental, bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi. Indonesia harus memiliki peta jalan hilirisasi karena dua alasan mendasar. Pertama, cukup banyaknya sumber daya alam kita yaitu nikel terbesar di dunia dan bauksit nomor 4 di dunia. Selain nikel dan bauksit, mineral strategis juga ditingkatkan nilai tambahnya seperti kobalt, litium, dan aluminium.

Dengan penetapan 22 mineral strategis oleh pemerintah, hilirisasi diharapkan memberi efek ganda bagi masyarakat, memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kedua, Indonesia harus belajar pada negara-negara yang lebih maju. Menteri Bahlil menegaskan bahwa hilirisasi dan industrialisasi tidak akan berhasil tanpa keterlibatan negara secara massif, misalnya Tiongkok dan Korea. Hilirisasi, menurut beliau, tidak hanya berlaku di sektor mineral dan batubara, tetapi juga harus meliputi sektor perikanan, kehutanan, pertanian, dan perkebunan.

Menteri Bahlil juga menyinggung perdebatan yang muncul terkait hilirisasi, antara kebutuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, karena keperluan ekonomi juga harus ciptakan lapangan kerja. Perdebatan terjadi antara hilirisasi padat teknologi atau padat karya. Bahlil optimis, jika hilirisasi dijalankan secara konsisten, maka kedaulatan ekonomi Indonesia akan terwujud. "Hilirisasi harus juga berkeadilan dan berkelanjutan. Kami akui bahwa hilirisasi belum sempurna. Hilirisasi berkeadilan, selama ini masih banyak diterima manfaatnya oleh pemerintah dan investor. Ke depannya harus orang-orang daerah yang dapat manfaat hilirisasi secara bertahap. Kita juga harus sadar bahwa hilirisasi ini perlu ramah lingkungan," pungkas Bahlil.

Indonesia juga memiliki keunggulan komparatif pada sektor energi terbarukan karena memiliki sumber daya dan teknologi seperti Carbon Capture Storage (CCS). Namun, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dan kerja sama internasional tetap diperlukan.

Khoo Tee Tan, Senior Partner & Managing Partner McKinsey & Company, menyampaikan bahwa banyak negara yang mempunyai aspirasi menjadi negara

berpendapatan tinggi (high income countries) namun hanya segelintir negara yang berhasil mencapai status negara berpendapatan tinggi seperti Tiongkok dan Malaysia. Dalam paparannya yang berjudul "Downstreaming Towards Indonesia Emas", Khoo Tee Tan menyatakan Indonesia dapat mencapai "Indonesia Emas" dengan mempercepat pertumbuhan produktivitas melalui lima modal utama: modal finansial, modal manusia, modal kelembagaan, modal infrastruktur, dan modal kewirausahaan.

Khoo Tee Tan menyoroti tren global hilirisasi industri sebagai strategi pembangunan, dengan mengacu pada keberhasilan Tiongkok dalam pengembangan industri aluminium serta Malaysia dalam industri timah solder. Dalam upaya untuk mencapai keberhasilan seperti kedua negara tersebut, ia mengingatkan bahwa pentingnya bagi pemerintah Indonesia untuk menjaga konsistensi regulasi dan pengembangan talenta lokal yang sesuai dengan kebutuhan investor global.

Sementara itu, Dini Sandys, Senior Vice President Center for Strategic Energy and Resources (CSER), mengajak Indonesia untuk mengembangkan strategi energi terbarukan berbasis New Structural Economics (NSE). Ia menjelaskan bahwa dominasi Tiongkok dalam rantai pasok energi bersih—lebih dari 80% pada solar photovoltaics (PV), komponen baterai (anoda / katoda), dan pengolahan rare earth—mengancam daya saing negara berkembang. "Tanpa koordinasi kelembagaan yang kuat dan investasi pada research & development (R&D) serta teknologi rendah karbon, negara-negara berkembang berisiko terjebak dalam green middle income trap," jelasnya.

Dalam konteks regional, Dini Sandys menilai ASEAN Power Grid sebagai peluang untuk meningkatkan ketahanan energi kawasan, namun tantangannya terletak pada

ketidakharmonisan regulasi, pembiayaan, dan resistensi politik. Ia mendorong adanya proyek percontohan bilateral untuk menciptakan standar PPA dan integrasi sistem jaringan listrik lintas negara.

Prof. Arif Satria, Rektor IPB University, dalam pemaparannya "Downstreaming and Reindustrialization of Food & Energy in Response to Change Contemporary Geopolitics" menyoroti pentingnya hilirisasi sektor agro-maritim sebagai pilar utama reindustrialisasi Indonesia. Ia memaparkan bahwa sektor ini bukan hanya menyangkut pengolahan komoditas seperti sawit, coklat, kelapa, dan rumput laut, tapi juga merupakan sumber ketahanan ekonomi di masa krisis. "Agro-maritim adalah leading sector dari perekonomian di Indonesia karena relevan dengan struktur sosial, sumber kehidupan banyak masyarakat, dan sebagai penyelamat ekonomi di kala krisis," tegasnya.

Ia juga menekankan peran penting perguruan tinggi dalam transisi menuju ekonomi berbasis inovasi, mulai dari riset, teknologi biomassa, hingga kewirausahaan berbasis produktivitas. Jenpino Ngabdi, Wakil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, menutup sesi dengan paparan tentang pembangunan smelter tembaga di Gresik dengan kapasitas 1,7 juta dmt/tahun dan kilang logam mulia sebesar 6.000 ton/tahun. Dengan total kapasitas 800.000 ton copper cathodes dari PT Freeport Indonesia dan PT Smelting, Indonesia diproyeksikan menjadi produsen katoda tembaga terbesar kelima di dunia, sekaligus motor penggerak ekosistem kendaraan listrik dan energi terbarukan global. Transformasi sektor energi dan industri bukan hanya menjadi kebutuhan domestik, tetapi bagian dari strategi besar Indonesia dalam menentukan posisi strategisnya di tengah arsitektur geopolitik dunia yang terus berubah.



Relevansi Energi Terbarukan dalam Perubahan Geopolitik dan Geoekonomi Global

Chairman E-Life Solutions, Universiti Teknologi Malaysia Prof. Eko Supriyanto dalam pemaparannya menyebutkan bahwa kita memiliki empat sumber energi yaitu sumber energi dari fosil yang akan segera dihentikan penggunaannya, sumber energi dari biomaterial yang memiliki harga cukup tinggi, sumber energi terbarukan, dan juga sumber energi dari matahari atau solar power. Solar Power dinilai paling efisien namun tetap membutuhkan penyimpanan baterai dalam pengaplikasiannya karena solar power tidak dapat berdiri sendiri.

Prof. Eko Supriyanto menuturkan bahwa puncak dari penggunaan energi dari fosil akan diperkirakan tercapai pada tahun 2030. Setelah itu, penggunaan energi fosil akan berkurang dan transisi energi menuju energi terbarukan di seluruh dunia akan bergerak dengan cepat dari tahun 2030 hingga tahun 2060 mendatang.

Salah satu hal penting dalam transisi energi terbarukan adalah partisipasi masyarakat. "Kita tahu bahwa negara-negara selalu melibatkan perusahaan besar untuk menangani listrik, tetapi dalam kasus ini untuk menyediakan listrik di daerah setempat, dan kemudian kita dapat membeli dengan harga yang lebih rendah sehingga kita dapat melibatkan beberapa peserta lokal. Misalnya, beberapa program di Indonesia, seperti program Access yang menyediakan jaringan listrik tenaga surya mini dan pompa air ke 22 desa terpencil di Indonesia, Nusa Tenggara," tuturnya.

Di samping itu, Prof. Eko Supriyanto juga menyebutkan bahwa energi terbarukan juga menimbulkan tantangan baru seperti biaya penyimpanannya yang masih tinggi, perizinan, regulasi hingga kesadaran dan keterlibatan publik.

Terkait energi terbarukan, Prof. Ari Kuncoro, Profesor ekonomi dari Universitas Indonesia menyebutkan bahwa peralihan ke energi terbarukan sebenarnya membuat pasar energi lebih kompetitif. "Ini sangat menarik, jika harga minyak naik terlalu tinggi maka itu adalah peluang bagi energi terbarukan dan produsen mobil listrik. Bahkan satu merek di Indonesia sekarang justru menggusur merek lain. Namun pada saat yang sama, produsen energi tetap membutuhkan minyak, mengapa? Karena bagaimanapun mereka adalah produsen energi, mereka hanya melakukan transformasi dari fosil ke non fosil. Jadi mereka membutuhkan pendapatan dari minyak, untuk menciptakan dana guna melakukan penelitian tentang energi terbarukan. Ini sangat baik karena merupakan pasar yang kompetitif," jelasnya.

Adanya perang dagang saat ini dinilai Prof. Ari Kuncoro hanyalah puncak dari gunung es. Dibalik itu, disebutnya, situasi lebih rumit. "Pergeseran dari energi berbahan baku fosil menuju energi terbarukan menciptakan peluang dan tantangan. Di masa lalu, perubahan dari tenaga kuda ke mesin uap menjadikan Inggris sebagai negara adidaya," tuturnya.

Lead Advisor – Southeast Asia Region, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA); Secretary General, International Economic Association

Dr. Lili Yan Ing menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan memprioritaskan energi terbarukan dengan menjadikan energi terbarukan tidak hanya sebagai prioritas strategis, tetapi juga terkait dengan geopolitik dan ekonomi.

Di ASEAN, transisi energi merupakan agenda kerja sama regional ASEAN. agenda kerja sama yang pertama adalah masing-masing negara ASEAN memiliki sumber daya yang beragam. Negara ASEAN juga bekerja sama dalam meningkatkan pasokan dan lingkungan yang saling terhubung untuk meningkatkan ketahanan energi seperti menghubungkan infrastruktur listrik di seluruh asia tenggara. Ketiga, negara-negara ASEAN memobilisasi investasi yang memungkinkan pengembangan energi terbarukan dengan ASEAN Catalytic Green Finance Facility (ACGF) yang pada dasarnya mengelola keuangan publik dan swasta untuk proyek energi terbarukan. Yang terakhir adalah strategi dan kerangka kerja ASEAN yang menyelaraskan kebijakan. Indonesia Bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya sangat aktif dalam menyelaraskan standar-standar dalam energi terbarukan,

Energi terbarukan bagi ASEAN juga merupakan alat diplomasi ekonomi. ASEAN juga sangat aktif dalam perjanjian bersama terkait dengan standarisasi sertifikasi energi terbarukan, proses perizinan, dan pasar karbon. Terakhir, ASEAN juga membantu menarik investasi hijau dan modal keuangan hijau, serta dana iklim. "Ini adalah sesuatu yang dikerjakan ASEAN bersama-sama — untuk menggunakan agenda transisi energi terbarukan sebagai alat diplomatik dalam negosiasi perdagangan," tegasnya.





Executive Advisor for Nickel Downstreaming, PT Vale Indonesia Tbk Vinicius Mendes, Ph.D. menyebutkan bahwa PT. Vale Indonesia yang telah turut berkontribusi dalam hilirisasi nikel sejak tahun 1978 menerapkan prinsip ESG dalam pengoperasian tambang yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. "Ya, fokus kami adalah disiplin. Fokus kami — seperti yang Anda lihat — adalah pada keselamatan, lingkungan, dan ESG. Saya dulu berkata, ketika saya masih di operasi Sorowako, bahwa: "Mari kita fokus pada melakukan hal yang benar — untuk lingkungan, untuk masyarakat — dan produksi adalah konsekuensinya." dan ini adalah budaya yang kami miliki di perusahaan kami," tuturnya.

Vinicius Mendes yakin bahwa Indonesia masih memiliki potensi untuk menjadi pusat nikel dunia. Maka dari itu, PT Vale Indonesia mendukung program hilirisasi pemerintah. Melihat pemerintah meningkatkan standar ESG menurutnya merupakan langkah yang tepat. "Kita harus dapat menyediakan pasokan nikel dengan cara yang lebih bertanggung jawab dan tentu saja dengan mengaitkannya dengan energi hijau," jelasnya.

Terkait dengan penerapan ESG, Vinicius Mendez menuturkan bahwa air di danau tempat PT. Vale melakukan aktivitas penambangan nikel di Sorowako masih aman dikonsumsi bahkan setelah aktivitas penambangan tersebut berjalan selama 60 tahun. Hal tersebut menunjukkan komitmen PT. Vale untuk mendukung transisi energi. "Fokus kami adalah untuk menyediakan nikel berkelanjutan dari operasi dan proyek kami— membangun kemitraan strategis dan membuat nikel berkualitas terbaik Indonesia tersohor di dunia," tutupnya.

Peran kota sebagai pusat inovasi dan ketahanan menghadapi perubahan iklim, urbanisasi, dan guncangan ekonomi.

Jakarta sebagai sebuah kota yang besar yang memiliki magnet ekonomi yang menghadapi berbagai isu terkait energi seperti pemindahan ibu kota serta ketergantungan terhadap daya listrik yang disebabkan oleh rendahnya energi terbarukan hingga polusi udara. Kepala Bappeda DKI Jakarta Atika Nur Rahmania menyebutkan bahwa terdapat beberapa peraturan pembangunan rendah karbon.

"Kita memiliki banyak regulasi pembangunan rendah karbon. kita telah memulai

pengembangan kebijakan rendah karbon di Jakarta berkolaborasi dengan C40 Community Series, berkomitmen untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan pemanasan global. Kemudian pada tahun 2009, di COP Denmark, 30%, dan kita juga melakukan pembangunan rendah karbon di tingkat nasional dan subnasional," jelasnya.

Jakarta juga memiliki Rencana Umum Energi Daerah (RPD) tahun 2023–2050 dengan visi memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta memimpin dalam penerapan teknologi energi dengan mendorong peran serta masyarakat.

Terdapat enam arah kebijakan utama pengembangan energi yaitu pasokan energi yang cukup, aman, dan andal; pemanfaatan energi baru dan terbarukan; peningkatan konservasi dan diversifikasi; pengurangan dampak lingkungan dari sektor energi; dan peningkatan kemampuan pengelolaan energi.

Terkait pengembangan infrastruktur energi, Jakarta memiliki total panel surya terpasang dengan kapasitas sebesar 34,38 MW, dengan energi terbarukan yang menyumbang 0,66% dari bauran energi Jakarta. Kebijakan ini juga dicantumkan dalam RUED 2023–2050, dan saat ini, Bappeda Provinsi DKI Jakarta juga sedang melaksanakan inisiatif dan proyek percontohan yang selaras dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

"Itulah prinsip kami tentang cara melaksanakan proyek investasi hijau dan rendah karbon di Jakarta. Kami berupaya menyediakan banyak ruang publik. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, kami membutuhkan lebih banyak ruang publik — ruang komunitas terbuka," jelasnya.

Pembicara kedua Counsellor - Department of Climate Change, Energy, the Environment, and Water, Government of Australia, Chris Broomfield menyebutkan bahwa Australia berkomitmen menyediakan 82 persen energi terbarukan di tahun 2030. "Australia mencapai 46% energi terbarukan dalam 25 tahun — kami harus menggandakannya dalam lima tahun ke depan, yang menimbulkan banyak pertanyaan. Untungnya, salah satu negara bagian kami, Australia Selatan, bagi kami merupakan semacam "laboratorium hidup". Australia Selatan memiliki proporsi energi terbarukan tertinggi di Australia — saat ini memiliki 74% energi terbarukan pada tahun 2024 dan menargetkan 100% energi terbarukan pada tahun 2027," jelasnya.

Chris Bloomfield juga mengapresiasi PLN atas penerbitan RUPTL PLN. "Saya antusias dengan peningkatan jumlah energi terbarukan. Tentu saja, saya ingin melihat lebih banyak lagi," tuturnya.



Menurutnya, ketahanan energi berubah dengan cepat — dari lokasi sumur minyak dan gas, kilang minyak, dan jaringan pipa, hingga pendistribusian energi melalui jalur transmisi, cara menghasilkan energi melalui tenaga surya, panas bumi, angin, hingga cara menyimpan dan mengelola energi — seperti melalui baterai.

“Dan jika kita memiliki lingkungan dengan konsentrasi besar industri minyak dengan satu pemasok, kita akan mempertimbangkan cara mendiversifikasi rantai pasokan tersebut. Dan kita ingin melihat rantai pasokan yang terdiversifikasi yang sama dalam energi terbarukan,” ujarnya.

Associate Researcher of the Institute of Ecological Civilization, Director of Natural Resources Assets Accounting Research Department, Center for Sustainable Development, Chinese Academy of Social Sciences Zhang Ying menyebutkan bahwa kota-kota global semakin menerapkan strategi adaptif untuk meningkatkan ketahanan di tengah perubahan iklim dan urbanisasi yang cepat, dengan penekanan khusus pada pengamanan layanan penting seperti pasokan air dan pengelolaan limbah.

Strategi ini menggabungkan perencanaan jangka panjang dengan tindakan jangka pendek, fleksibilitas dalam pembuatan kebijakan, dan keterlibatan masyarakat secara aktif.

Pendekatan inti melibatkan pengintegrasian teknologi energi terbarukan—seperti tenaga surya, angin, dan jaringan pintar—ke dalam infrastruktur perkotaan, termasuk sistem air dan fasilitas pengolahan limbah, untuk memastikan layanan tanpa gangguan selama gangguan yang disebabkan oleh iklim. Misalnya, inisiatif pembangunan energi nol-bersih mendukung sistem utilitas yang terdesentralisasi dan hemat energi.

Zhang Ziyi menyebutkan bahwa praktik terbaik Tiongkok, terutama di Shanghai, menunjukkan keberhasilan model berbasis masyarakat yang melibatkan pemerintah daerah, komite lingkungan, dan LSM untuk menjaga layanan publik. Sistem tersebut dirancang dengan fleksibilitas struktural dan redundansi proses untuk menahan guncangan, sementara kemitraan publik-swasta dan promosi industri hijau semakin memperkuat ketahanan ekonomi dan lingkungan perkotaan.

Managing Director, VinFuture Foundation & "For Green Future" Foundation (Vingroup) Dr. Thai-Ha Le menyebutkan bahwa Vietnam secara aktif memajukan strategi tingkat kota untuk meningkatkan ketahanan energi dan ekonomi melalui perencanaan perkotaan terpadu, infrastruktur energi terbarukan, dan teknologi adaptif lokal. Kota-kota besar seperti Kota Ho Chi Minh dan Hanoi menerapkan solusi terdesentralisasi seperti panel surya atap, jaringan mikro, jaringan pintar, dan transportasi umum listrik untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengatasi permintaan energi yang terus meningkat.

Sebagai respons terhadap risiko iklim seperti banjir dan gelombang panas, kota-kota di Vietnam mengadopsi pemetaan risiko energi dan perencanaan ketahanan yang selaras dengan tujuan nol emisi nasional. Inovasi lokal, yang didukung oleh kemitraan publik-swasta dan kolaborasi regional, membantu membangun sistem perkotaan yang berkelanjutan dan mandiri. Prakarsa-prakarsa ini memposisikan Vietnam sebagai pemimpin regional dalam membina kota-kota yang tangguh terhadap iklim dan rendah karbon.

Tren Positif Realisasi Investasi Indonesia

Pada triwulan I tahun 2025 realisasi investasi Indonesia mencapai Rp465,2 triliun angka tersebut setara dengan 24,4% dari total target sebesar Rp1.905,6 triliun.

Realisasi Investasi 2020-2025 (Triwulan I)

dalam Trilliun rupiah



Sumber: Indonesiabaik.id

Hilirisasi Menjadi Langkah Indonesia Menuju Negara Maju

Hilirisasi adalah sebuah instrumen untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi negara," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) Bahlil Lahadalia. Hal tersebut disampaikan kepada Peserta Program Pendidikan Penyiapan dan Pematapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan 68 Tahun 2025 dalam Kuliah Umum Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Bertempat di Auditorium Gajah Mada pada Senin, 28 April 2025, Menteri ESDM menyampaikan materi tentang Hilirisasi Sumber Daya Alam: Jalan Menuju Kemandirian Ekonomi Bangsa.



Kuliah Umum tersebut diawali dengan laporan Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. Dalam laporannya, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa materi terkait hilirisasi sumber daya alam merupakan materi yang sangat penting bagi seluruh peserta Lemhannas RI karena merupakan salah satu gatra utama dalam dimensi Astagatra. Kehadiran Menteri ESDM yang juga merupakan Ketua Satgas Hilirisasi diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada para peserta pendidikan terkait hilirisasi sumber daya alam.

“Bagi kami kehadiran Pak Menteri akan semakin memperkaya kebijakan baru dari pemerintah terkait kebijakan sumber kekayaan alam,” ujar Gubernur Lemhannas RI.

Memulai paparannya, Menteri ESDM menyampaikan gambaran umum hilirisasi di Indonesia yang setiap tahunnya mengalami peningkatan investasi. Pertumbuhan investasi tersebut didorong minat investasi pada

lima sektor industri utama, yakni mineral, pertanian/perkebunan, kehutanan, petrokimia, dan ekosistem kendaraan listrik.

Selanjutnya Menteri ESDM menjelaskan terkait peta jalan hilirisasi dan investasi strategis Indonesia. Dalam peta tersebut tergambar bahwa hilirisasi akan memberikan dampak ekonomi yang sangat besar baik melalui investasi, peningkatan PDB, peningkatan ekspor, dan penyerapan tenaga kerja.

Menurut Menteri ESDM, langkah hilirisasi dan industrialisasi merupakan kunci untuk menjadi negara maju. “Di dunia tidak ada negara maju tanpa ada hilirisasi dengan melibatkan negara,” kata Menteri ESDM. Namun, langkah yang diambil harus dilakukan secara masif. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu langkah nyata yang telah diambil pemerintah adalah pembentukan satgas hilirisasi dan ketahanan energi yang diketuai oleh Menteri ESDM yang berkolaborasi dengan kementerian dan

instansi terkait. Pembentukan satgas tersebut bertujuan untuk mendukung peningkatan nilai tambah industri dalam negeri guna mencapai ketahanan energi.

Lebih lanjut, Menteri ESDM menekankan bahwa langkah hilirisasi merupakan langkah yang bagus, tapi harus diakui hilirisasi di Indonesia belum sempurna. Negara-negara lain menerapkan hilirisasi dengan desain, sedangkan Indonesia belum memiliki peta jalan regulasi dan mekanisme yang baku. Dengan demikian, dampak hilirisasi belum dinikmati secara merata. Oleh karena itu, Menteri ESDM menekankan pentingnya tata kelola dan regulasi yang diterapkan.

Turut hadir mendampingi Menteri ESDM dalam kuliah umum tersebut, yakni Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Negosiasi, Diplomasi, dan Kerjasama Mineral dan Batubara Michael Wattimena serta Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Umar Ali Lessy.



Seratus Dosen, Guru, dan Widyaiswara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Mendapatkan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dari Lemhannas RI

Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. membuka secara resmi Pelatihan Untuk Pelatih/ Training of Trainers (ToT) Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) bagi Dosen, Guru dan Widyaiswara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis, 24 April 2025. Selama 11 hari Lemhannas RI akan

memberikan pemantapan nilai-nilai kepada 100 peserta yang terdiri atas dosen, guru, dan widyaiswara.

“Melalui pelatihan ini, para dosen, guru, dan widyaiswara diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam mewujudkan proses pembelajaran yang berkarakter kebangsaan, yang dilaksanakan secara efektif, inovatif, dan

kreatif, sehingga benar-benar menyentuh dimensi rasa dan jiwa kebangsaan peserta didik,” kata Gubernur Lemhannas RI saat menyampaikan sambutannya. Dengan demikian, akan terwujud karakter bangsa yang kuat dan berakar pada nilai-nilai luhur Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada pendiri bangsa.



Lebih lanjut Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa para peserta pelatihan akan dibekali berbagai materi yang memperkuat kemampuan dalam mengelola keterampilan, wawasan, dan metode pembelajaran. Hal tersebut bertujuan agar para peserta tidak hanya menjadi pengajar yang baik, tetapi juga menjadi fasilitator yang andal, yang mampu mentransformasikan nilai-nilai kebangsaan ke dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam kehidupan sehari-hari. "Hal itu merupakan inti dari pembentukan kepribadian ke-Indonesiaan yang berwawasan kebangsaan," ujar Gubernur Lemhannas RI.

Diharapkan setelah mengikuti pelatihan tersebut para peserta dapat lebih mengenali dan menggali potensi peserta didik, termasuk potensi yang selama ini mungkin tersembunyi. Training of Trainers (ToT) Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan memegang peranan penting sebagai pengawal dan penunjuk arah dalam upaya membentuk karakter kebangsaan dalam proses pendidikan.

Sebagai informasi, Training of Trainers (ToT) Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan merupakan sebuah model pelatihan yang dikembangkan Lemhannas RI dalam rangka meningkatkan kemampuan dan menambah pengetahuan pengajar-pengajar di bidang nilai-nilai kebangsaan yang memiliki semangat dan kompetensi yang tinggi, sehingga terwujud satu pemahaman dan implementasi yang kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa.

Setelah upacara pembukaan, Gubernur Lemhannas RI memberikan pengantar pimpinan kepada seluruh peserta. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI memberikan pengantar terkait kondisi Geopolitik Global, Astacita, dan Tantangan dalam mewujudkan ketahanan nasional. Menurut Gubernur Lemhannas RI, ditengah ketidakpastian para guru, dosen, dan widyaiswara memegang peran penting sebagai agen perubahan.

Agen perubahan berperan dalam menyebarkan semangat cinta tanah air, menghargai simbol-simbol negara, dan membangun kebanggaan terhadap identitas nasional. Kemudian agen perubahan juga turut menjaga keutuhan NKRI dari ancaman disintegrasi seperti radikalisme, separatisme, dan konflik antargolongan. Namun, tentunya agen perubahan juga menghadapi tantangan dinamika geopolitik. Salah satunya adalah terbukanya akses informasi membawa paham asing yang dapat menggerus ideologi bangsa. Dengan demikian, dosen, guru, dan widyaiswara perlu memperkuat pemahaman Pancasila pada peserta didik.

"Oleh karena itu, sebagai pengarah pola pikir generasi, agen perubahan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter yang berintegritas, tangguh, dan berpihak pada masa depan Indonesia," pungkas Gubernur Lemhannas RI.



HUT Lemhannas RI ke-60: Menjemput Masa Depan dengan Ketahanan Strategis Bangsa

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-60 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), diselenggarakan acara syukuran dan orasi kebangsaan di Ruang Dwi Warna, Lemhannas RI, Selasa (20/5). Dengan mengusung tema “Ketahanan Nasional Wujudkan Indonesia Maju: Dari Stabilitas Menuju Inovasi Berkelanjutan, Rejuvenasi Lemhannas: Pilar Ketahanan

Nasional,” peringatan ini menjadi momentum reflektif atas kontribusi Lemhannas RI dalam menjaga eksistensi dan arah pembangunan bangsa.

Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., mehekankan bahwa ulang tahun ini bukan sekadar penanda waktu, tetapi pengingat pentingnya transformasi berkelanjutan. Ia mengutip gagasan Dr. Daed Joesoef

tentang tiga “tanah air” Indonesia: tanah air riil (wilayah fisik), tanah air formal (hasil proklamasi), dan tanah air mental (Pancasila) yang harus dikonvergensiikan untuk menjaga ketahanan nasional yang utuh.

Gubernur juga mengingatkan bahwa dunia kini berada dalam era yang sulit diprediksi, ditandai oleh krisis global, fragmentasi ekonomi, disinformasi digital, dan ancaman

siber. Tahun 2023, Indonesia tercatat menerima lebih dari 11 juta serangan siber yang menyasar infrastruktur digital. Karena itu, ketahanan nasional tidak lagi hanya berarti pertahanan militer, tetapi merupakan sinergi kekuatan strategis di bidang ekonomi, sosial, budaya, digital, dan lingkungan.

Sejalan dengan semangat Raksaka Dharma—penjaga nilai luhur kebangsaan—Lemhannas RI dituntut melakukan rejuvenasi kelembagaan. Transformasi digital, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi berkelanjutan diperlukan agar Lemhannas tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Presiden Soekarno telah menggarisbawahi bahwa pertahanan nasional harus melibatkan seluruh elemen masyarakat di seluruh penjuru nusantara.

Menurut Gubernur, bangsa yang tangguh membutuhkan daya tahan sistemik—kemampuan menghadapi disrupsi global, krisis ekologis, dan infiltrasi ideologi—yang diperkuat dengan integritas dan nilai kebangsaan seluruh anak bangsa. Ketahanan ini harus menjadi fondasi pembangunan jangka panjang, guna menuju Indonesia Emas 2045 yang tidak hanya to have more (makmur), tetapi juga to be more (bermartabat).

Lemhannas RI telah merumuskan enam pilar ketahanan strategis sebagai kerangka kebijakan. Pertama, dimensi ideologi – Berakar pada Pancasila untuk menghadapi radikalisme, intoleransi, dan polarisasi. Kedua, dimensi sosial dan budaya – Memperkuat kohesi sosial, gotong royong, dan demokrasi yang inklusif. Ketiga, dimensi ekonomi – Membangun ekonomi inklusif, UMKM yang tangguh, dan kebijakan hilirisasi untuk memperkuat daya saing. Keempat, dimensi Ekologi dan Iklim – Menjaga lingkungan melalui transisi energi bersih dan mitigasi bencana. Kelima, dimensi teknologi digital – Mendorong kemandirian teknologi melalui riset, pengembangan SDM digital, dan ketahanan siber. Terakhir, dimensi pemerintahan – Mewujudkan tata kelola yang adaptif, responsif, dan akuntabel dalam mendukung demokrasi yang matang.

Enam pilar ini bersandar pada konsep resilience-based development dan doktrin Asta Gatra, yang menuntut kolaborasi lintas sektor serta kepemimpinan yang visioner dan inklusif.

Gubernur menegaskan bahwa rejuvenasi Lemhannas tidak bisa ditunda. Transformasi struktural dan substansial diperlukan untuk memperkuat kapasitas

analitis, memperbarui kurikulum berbasis data, serta melibatkan generasi muda sebagai penggerak utama. Ketangkasan dan inovasi menjadi kunci dalam membentuk cara berpikir dan cara bekerja yang sesuai dengan tuntutan zaman.

“Melalui Lemhannas RI yang kita banggakan ini, mari kita berani menjemput masa depan. Dunia tidak akan menunggu bangsa yang ragu-ragu. Kita harus berani keluar dari zona nyaman, bertransformasi, dan memimpin,” seru Gubernur Lemhannas RI di akhir orasinya.

Sebagai bagian dari perayaan, turut diselenggarakan pameran 60 judul buku karya sivitas Lemhannas RI, pemotongan tumpeng, dan penyerahan surat keputusan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pengajar Ketahanan Nasional oleh Ketua BNSP Syamsi Hari, S.E., M.M. Gubernur menyampaikan bahwa pendirian LSP ini merupakan hasil rintisan para pemimpin Lemhannas sebelumnya, yang kini menjadi kado istimewa di usia ke-60 lembaga ini.

Acara turut dihadiri oleh para mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Lemhannas RI, seperti Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, Prof. Dr. Ermaya Suradinata, Andi Widjajanto, serta Marsdy (Purn) Wieko Syofyan.



Memasuki Usia ke-60 Tahun, Lemhannas RI Terus Mengenang Jasa Para Patriot Bangsa

Setelah melaksanakan ziarah ke Makam Bung Karno di Blitar pada 16 Mei 2025 lalu sebagai rangkaian peringatan HUT ke-60 Lemhannas RI, Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. kemudian memimpin Upacara Ziarah dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-60 Lemhannas RI di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata pada Senin, 19 Mei 2025.

Hadir dalam upacara tersebut Gubernur Lemhannas RI yang didampingi Nyonya Rita Ace Hasan Syadzily; Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Edwin, S.H., M.Han., M.H. yang didampingi Nyonya Wenny Edwin; Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. R. Z. Panca Putra S.,



M.si. beserta Nyonya Rita Panca Putra; seluruh pejabat struktural dan fungsional Lemhannas RI, perwakilan peserta pendidikan; pengurus Perista Lemhannas RI; dan serta seluruh personel Lemhannas RI.

Gubernur Lemhannas RI memimpin penghormatan kepada arwah pahlawan dengan diiringi lagu Last Post. Kemudian Gubernur Lemhannas RI memimpin seluruh peserta upacara untuk mengheningkan cipta. Setelahnya Gubernur Lemhannas RI melakukan peletakan karangan bunga. Setelahnya upacara ditutup dengan pembacaan doa dan dilanjutkan dengan tabur bunga.

Selepas rangkaian upacara, Gubernur Lemhannas RI dan rombongan Lemhannas RI melaksanakan tabur bunga di pusara beberapa pahlawan dan pejabat Lemhannas RI. Gubernur Lemhannas RI bersama rombongan mengawali tabur bunga pada makam Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, selanjutnya ke makam Ainun Habibie, Ani Yudhoyono, dan Mayjen TNI Sutojo Siswomiharjo (Ayah kandung Gubernur

Lemhannas RI periode 2016—2022 Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo), dan ubernur Lemhannas periode 1965—1968 Mayjen TNI Wiluyo Puspoyudo.

Tabur bunga juga dilaksanakan ke makam beberapa pejabat Lemhannas RI, di antaranya, Gubernur Lemhannas RI periode 1974—1978 Letjen TNI Sayidiman Suryohadiprojo; Gubernur Lemhannas RI periode 1978—1983 Letjen TNI Sutopo Yuwono; Gubernur Lemhannas RI periode 1983—1989 Letjen TNI Subijakto Prawira Subrata; dan Gubernur Lemhannas RI periode 1994—1996 Letjen TNI Mutojib.

Kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan bagi para pahlawan bangsa yang telah berjasa bagi bangsa Indonesia,

termasuk Lemhannas RI. Momentum ini juga salah satu bentuk upaya untuk mengingat dan merawat semangat tinggi serta perjuangan para pahlawan, terutama dalam bidang ketahanan nasional sebagai entitas bangsa dan negara.

Dalam kesan pesan yang disampaikan pada buku tamu pengunjung, Gubernur Lemhannas RI menuliskan komitmen Lemhannas RI untuk terus melanjutkan tongkat estafet perjuangan para pahlawan bangsa. “Kami berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan bangsa mempertahankan keutuhan negara. Meraih cita-cita perjuangan untuk cita-cita pahlawan 1945. Indonesia maju” tulis Gubernur Lemhannas RI.





Rotasi Sejumlah Pejabat di Lemhannas RI Sebagai Wujud Penyegaran Organisasi

Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. memimpin Upacara Serah Terima Jabatan Inspektur, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Eselon II dan III, serta Pelepasan Pejabat Eselon I dan II Lemhannas RI pada Senin, 5 Mei 2025. Rotasi jabatan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 60 dan 66 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Lemhannas RI.

Dalam kegiatan tersebut secara khusus dilaksanakan serah terima jabatan Inspektur Lemhannas RI dari Brigjen Pol Yun Imanullah, S.I.K. kepada Kombes Pol Udin Zainudin, S.I.K., M.H. Selain itu, Gubernur Lemhannas RI juga melantik 19 pejabat Lemhannas RI dan melepas 3 pejabat tinggi Lemhannas RI.

“Saya meyakini kemampuan dan pengalaman yang saudara miliki, dapat menjadi modal untuk beradaptasi dan

menyesuaikan diri dengan cepat dalam menjalankan amanah atau kepercayaan negara yang saudara terima,” kata Gubernur Lemhannas RI. Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan harapannya atas ide-ide baru yang kreatif dan inovatif dari para personel yang baru dilantik. Ide-ide baru tersebut dipercaya akan menunjang tugas-tugas yang diemban dan mampu menjadi motivasi dan inspirasi bagi pegawai lainnya di Lemhannas RI.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI juga menekankan para personel yang baru dilantik mengemban peran penting dan strategis dalam mendukung upaya pencapaian tujuan Lemhannas RI. Hal tersebut tentunya tidak dapat dicapai secara individu, diperlukan kerja sama dan kolaborasi seluruh pihak untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan demikian, diharapkan seluruh personel Lemhannas RI dapat meningkatkan sinergi dalam dinamika kerja sama guna mendukung kemajuan Indonesia.

“Menjadi superman memang baik, tapi menjadi super team jauh lebih baik. Mari kita niatkan diri kita untuk bersama-sama membangun Lemhannas RI menjadi institusi yang lebih baik lagi,” ucap Gubernur Lemhannas RI.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur Lemhannas RI juga menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada tiga pejabat tinggi yang dilepas atas dedikasi, kontribusi, dan pengabdian di Lemhannas RI. “Kinerja dan prestasi saudara telah memberikan kontribusi besar dalam upaya peningkatan ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan bangsa Indonesia,” pungkas Gubernur Lemhannas RI.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksda TNI Edwin, S.H., M.Han., M.H., Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. R.Z. Panca Putra S., M.Si., pejabat struktural Lemhannas RI, dan Pengurus Perista Lemhannas RI.

Sestama Lemhannas RI Memberikan Pengenalan Lembaga kepada Peserta P3N Angkatan 25 Lemhannas RI

“Para peserta adalah pemimpin yang diharapkan masyarakat menjadi ujung tombak terdepan dalam membawa bangsa dan negara ini melalui institusi masing-masing,” kata Sekretaris Utama Lemhannas RI Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si. Hal tersebut disampaikan saat memberikan Pengenalan Lembaga kepada Peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan 25 Lemhannas RI.

Pada kesempatan tersebut, Sestama Lemhannas RI menyampaikan bahwa pembentukan Lemhannas RI berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 1964 tentang Pembentukan Lembaga Pertahanan Nasional. Berdirinya Lemhannas RI sejak 20 Mei 1965 bertujuan untuk mengintegrasikan antara sipil dan militer. Mengintegrasikan sipil dan militer yang dimaksud bukan hanya tentang mempertemukan saja, tapi untuk bersama-sama berpikir dan berupaya melakukan langkah-langkah strategis yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara.

Lebih lanjut, Sestama Lemhannas RI menekankan bahwa para Peserta P3N Angkatan 25 adalah orang-orang yang sudah mengemban jabatan strategis. Dengan demikian, para Peserta P3N

Angkatan 25 harus memiliki pemahaman dan pemaknaan yang baik atas konsensus dasar bangsa. Para Peserta P3N Angkatan 25 juga harus berpikir secara

*Pemimpin strategis nasional harus memiliki kemampuan dan cara berpikir yang **komprehensif, integral dan holistik.***

Komjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S. M.Si.

komprehensif, integral, dan holistik. “Pemimpin strategis nasional harus memiliki kemampuan dan cara berpikir yang komprehensif, integral, dan holistik,” ucap Sestama Lemhannas RI.

Kemudian Sestama Lemhannas RI menjelaskan struktur organisasi Lemhannas RI yang dipimpin Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. Selanjutnya Gubernur dibantu oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI, yakni Laksda TNI Edwin, S.H., M.Han., M.H. Dalam menjalankan fungsinya, Lemhannas RI memiliki tiga

kedeputan, yakni Kedeputan Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Kedeputan Pengkajian Strategik, dan Kedeputan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, serta Lemhannas RI memiliki Pusat Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional.

Dalam bidang dukungan manajemen, dipimpin oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI yang terdiri atas lima biro, yakni Biro Umum, Biro Perencanaan, Biro Hubungan Masyarakat, serta Biro Kerja Sama dan Hukum. “Kami dari lembaga siap melayani teman-teman peserta,” pungkas Sestama Lemhannas RI.

Menutup paparannya, Sestama Lemhannas RI menyampaikan pohon paradigma ketahanan nasional yang berakar pada empat konsensus dasar bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. “Pohon bisa kuat berdiri kalau didukung akar yang kuat di dalamnya, yakni empat konsensus dasar bangsa, yang tidak bisa ditawar-tawar,” kata Sestama Lemhannas RI.



Menteri Komunikasi dan Digital: Menjaga Ruang Digital yang Sehat, Aman, Produktif dan Berdaulat Harus Menjadi Prioritas dan Tugas Bersama

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Hafid berkesempatan memberikan kuliah umum kepada peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) angkatan ke-68 dan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) angkatan ke-25 Lemhannas RI di Auditorium Gajah Mada, pada Selasa (27/5). Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. menyambut langsung kedatangan Meutya Hafid.

Pada kesempatan tersebut, Meutya Hafid bicara tentang meningkatkan ketahanan nasional di era digital menghadapi hoaks dan ancaman siber. Dengan nama instansi yang baru, Meutya Hafid mengatakan "digitalisasi" merupakan afirmasi bagi Kemkomdigi RI yang akan berfokus dalam mencermati perkembangan digitalisasi sebagai concern Presiden Prabowo

Subianto dan terkhusus juga di bidang keamanan digital.

Dalam menghadapi konstelasi kekinian geopolitik dan geoekonomi, transformasi digital memainkan peranan strategis dalam membangun ketahanan nasional sebagai salah satu visi asta cita Presiden Prabowo Subianto. Ruang digital membawa peluang besar untuk kemajuan, namun sebagaimana diketahui disaat yang bersamaan juga membuka celah bagi risiko baru yang tidak dapat diabaikan.

Diantara permasalahan yang timbul, hoaks dan kebencian dapat merusak tatanan di ruang digital bahkan mengancam ketahanan nasional dalam seluruh dimensinya, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. "Oleh sebab itu menjaga ruang digital yang

sehat, aman, produktif dan berdaulat harus menjadi prioritas dan tugas kita bersama dalam menjaga kedaulatan bangsa. Sekali lagi kuncinya bahwa ini ada di berbagai lini, tidak hanya di ideologi, politik, ekonomi, tapi juga keamanan dan sosial budaya," ujar Meutya Hafid.

Dibalik kemajuan teknologi dan perluasan akses informasi, negara dihadapkan pada realitas ancaman dari hoaks dan kejahatan siber yang diklasifikasi menjadi



misinformasi (Informasi yang salah dan tersebar tanpa unsur kesengajaan yang lahir dari ketidaktahuan), disinformasi (Informasi palsu yang disebarkan secara sengaja dengan tujuan memperdaya, membelokkan opini, hingga merusak kepercayaan publik), dan malinformasi (Informasi yang benar, namun disebarluaskan dengan maksud menyakiti, mempermalukan, atau menghancurkan reputasi seseorang atau lembaga).

Adapun bahaya ancaman siber lain, diantaranya ransomware (penahanan data penting dengan menuntut tebusan), data breach (kebocoran data yang mengekspos informasi pribadi/lembaga), phishing (upaya penipuan lewat email, chat, situs palsu), baiting (penipuan dengan menawarkan hadiah), dan lainnya.

Lebih lanjut, Meutya Hafid menyampaikan ketahanan nasional juga bersifat multidimensional yang tidak hanya berdiri sendiri diatas militer, tetapi juga berpijak kokoh pada politik, ekonomi dan sosial budaya. Dari sisi ideologi hoaks yang bertebaran seperti paham radikalisme, intoleransi, dan konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian pada sisi politik, disinformasi digunakan untuk manipulasi opini publik dan mengganggu demokrasi.

Lalu dari aspek ekonomi, serangan siber menimbulkan kerugian yang berdampak pada sektor keuangan dan UMKM. Pada

aspek sosial budaya, ujaran kebencian yang tersebar tentang SARA dan konten manipulatif mengancam kohesi sosial. Sedangkan pada aspek pertahanan dan keamanan, ancaman pada sistem komando, komunikasi, dan intelijen negara yang ditargetkan pada server pemerintahan, sistem strategis, dan infrastruktur militer.

Sejalan dengan hoaks dan serangan siber, negara telah membuat strategi yang dituangkan pada penguatan regulasi, yakni Perlindungan Data Pribadi (asas keadilan, transparansi, akuntabilitas) yang diatur dalam UU No. 27/2022, lalu Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber dalam Perpres No. 47/2023, Sanksi lebih berat bagi kejahatan siber dalam UU No. 1/2024 (ITE revisi), Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dalam PP No. 71/2019, dan Pengaturan Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat dalam Permenkominfo No. 10/2021.

Selain penguatan regulasi, strategi dalam menghadapi hoaks dan serangan siber dapat dilakukan dengan meningkatkan literasi digital dan pengecekan fakta. Hal tersebut merupakan gerbang utama dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk teknologi digital secara bijak.

Lebih lanjut, Meutya Hafid juga menyampaikan strategi penanggulangan dalam menghadapi serangan siber.

Meutya Hafid menyampaikan bahwa kapasitas sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan dengan fokus membekali talenta digital yang adaptif dan berdaya saing tinggi.

Adapun pelatihan literasi digital yang dilakukan oleh Komdigi RI, yaitu micro skill, thematic academy, digital entrepreneurship academy, dan digital talent scholarship. Pelatihan-pelatihan tersebut mengadopsi teknologi lokal, seperti sistem deteksi dini hingga proteksi terhadap malware, ransomware, dan kebocoran data.

Selain meningkatkan kapasitas SDM, kolaborasi stakeholder juga perlu dibangun antara institusi (BSSN, Kemkomdigi, TNI/Polri unit siber), akademisi dan media massa, masyarakat sipil sampai organisasi non pemerintah, sektor swasta dan lembaga kementerian terkait.

“Komdigi akan senang jika bisa dibantu bapak ibu sekalian nantinya. Masyarakat harus kita beri penyuluhan, sosialisasi, pemahaman bahwa internet itu bisa digunakan untuk manfaat bahkan mudarat, hingga ujungnya dapat memilah sendiri mana yang aman (dan) yang tidak, yang baik (dan) yang tidak,” pungkas Meutya Hafid.



Pertemuan Wakil Gubernur dengan Para Taprof Guna Tingkatkan Kerja Sama

Wakil Gubernur Lemhannas RI, Laksda TNI Edwin, S.H., M.Han., M.H., mengadakan Pertemuan Tatap Muka Internal dengan Tenaga Profesional Tahun 2025 pada Rabu (7/5). Dalam pertemuan ini, beliau menekankan pentingnya kontribusi para profesional dalam membentuk karakter pemimpin nasional. "Saya mohon kerja sama dari para Tenaga Profesional untuk memberikan warna dalam membekali para pemimpin nasional," ujar Wakil Gubernur.

Beliau mengajak seluruh Tenaga Profesional untuk berperan aktif dalam menyukseskan program-program Lemhannas RI, mencakup bidang pendidikan, pengkajian strategis, dan pematapan nilai-nilai kebangsaan. Wakil Gubernur Lemhannas menegaskan bahwa keragaman latar belakang tenaga profesional di Lemhannas RI justru menjadi nilai tambah dalam menyiapkan pemimpin bangsa. "Kemajemukan yang ada di Lemhannas RI ini merupakan aset berharga untuk membekali para pemimpin bangsa," tambahnya.

Pertemuan ini menitikberatkan pada harapan bahwa pembekalan dari Lemhannas RI akan meningkatkan kapasitas pemimpin bangsa dalam berpikir secara komprehensif, holistik, dan integral. "Dengan pendekatan ini, kita dapat menjawab tantangan bangsa sekaligus mengurangi ego sektoral demi mencapai tujuan nasional," jelas Wakil Gubernur. Beliau menutup pertemuan dengan keyakinan bahwa Lemhannas RI akan terus melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas untuk membangun Indonesia yang lebih baik.





Seluruh Personel Lemhannas RI Peringati Hari Lahir Pancasila

Sekretaris Utama (Sestama) Lemhannas RI, Komjen Pol Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si., menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar mengenang rumusan dasar negara, melainkan momentum untuk meneguhkan komitmen terhadap nilai-nilai luhur pondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 pada Senin, 2 Juni 2025, di Lapangan Tengah Lemhannas RI.

Lebih lanjut, Sestama Lemhannas RI menekankan bahwa Pancasila bukan hanya dokumen historis atau teks normatif dalam Pembukaan UUD 1945. "Pancasila merupakan jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur," ujarnya.

Terkait pembangunan nasional, pemerintah telah menetapkan Asta Cita

sebagai delapan agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu pilar utamanya adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Memperkokoh Pancasila berarti memastikan pembangunan bangsa selalu berakar pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

"Melalui Asta Cita, kita diajak melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan, mulai dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang digital," tegas Sestama Lemhannas RI.

Ia juga menyoroti peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga yang bertugas membumikan Pancasila. Tugas ini, menurutnya, tidak mudah karena Pancasila harus dihidupi dan diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar dihafalkan. "Seluruh elemen bangsa harus menjadi pelaku utama pembumian Pancasila. BPIP tidak

dapat bekerja sendiri," imbuhnya.

Sestama Lemhannas RI mengajak seluruh peserta upacara menjadikan peringatan ini sebagai momen penguatan komitmen, bukan sekadar seremonial. "Jadikan setiap langkah, kebijakan, ucapan, dan tindakan kita sebagai cerminan semangat Pancasila," pesannya.

Di akhir sambutan, ia menegaskan bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh elemen masyarakat. "Peringatan ini harus mengingatkan kita bahwa setiap warga negara bertanggung jawab memastikan Pancasila menjadi jiwa dalam setiap denyut nadi pembangunan," ucapnya.

"Marilah kita bergotong royong menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menanamkan nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Jadikan Pancasila sumber inspirasi berkarya, berbangsa, dan bernegara," pungkas Sestama Lemhannas RI.

Gubernur Lemhannas RI Terima Audiensi Ketua Umum Kadin Indonesia



Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., beserta jajaran menerima audiensi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Ruang Tamu Gubernur pada Kamis, 5 Juni. Delegasi Kadin dipimpin langsung oleh Ketua Umum Anindya Novyan Bakrie, didampingi sejumlah pengurus.

Dalam kesempatan tersebut, Anindya Bakrie menyatakan bahwa peran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah telah ditegaskan dalam UUD 1945. "Kadin menaungi seluruh pelaku usaha, termasuk BUMN, koperasi, dan UMKM," ujarnya. Ia mengungkapkan komitmen untuk membentuk "pengusaha pejuang" bermental nasionalis yang tangguh di bidang ekonomi. Sejalan dengan hal itu, Kadin menggagas program penguatan wawasan kebangsaan bagi pengurusnya di pusat dan daerah.

Gubernur Lemhannas RI menyambut baik inisiatif tersebut dan mengapresiasi kesadaran pelaku usaha dalam mewujudkan ketahanan nasional. "Di tengah ketidakpastian global, dunia usaha memegang peran kunci untuk menunjukkan daya tahan bangsa," tegasnya. Sebagai school of geopolitics, Lemhannas RI senantiasa memantau perkembangan ketahanan nasional melalui delapan gatra, termasuk ekonomi.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur mengutip pandangan Presiden Prabowo Subianto tentang kecenderungan realisme dalam hubungan internasional, di mana negara fokus pada kepentingan nasional masing-masing. "Kita harus merespons dengan memperkuat nasionalisme dan patriotisme. Indonesia berpotensi menjadi negara besar berkat kekayaan luar biasa yang dimiliki," paparnya. Ia menegaskan kunci kejayaan Indonesia

terletak pada kemampuan dunia usaha menggali potensi dan membangun ekonomi kuat.

Lemhannas RI menyatakan kesiapan mendukung Kadin melalui penyusunan kurikulum penataran dan perluasan ruang kolaborasi. "Pemantapan kapasitas pengusaha sebagai 'pengusaha pejuang' sangat relevan di tengah tuntutan penguatan nilai kebangsaan. Situasi ini justru harus jadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia," tambah Gubernur.

Anindya Bakrie menegaskan kesiapan Kadin berkolaborasi dengan Lemhannas RI. "Masukan mengenai geopolitik dari Lemhannas sangat vital karena langsung berkaitan dengan perdagangan dan investasi. Kadin dengan 38 jaringan provinsi serta kabupaten/kota siap bergerak bersama asosiasi mendukung program pemerintah dan memperkuat pertahanan Indonesia," pungkasnya usai audiensi.



PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN

Lemhannas RI Dukung Penguatan Kepemimpinan Daerah Melalui

Manunggal Leadership Retreat 2025 di Jawa Tengah

Semarang, 10 Juni 2025 — Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) secara aktif memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Strategic Learning Manunggal Leadership Retreat 2025, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini berlangsung selama satu minggu penuh, dari tanggal 10 hingga 16 Juni 2025 di kompleks pelatihan BPSDMD Prov. Jateng dan dilaksanakan salah satunya untuk mewujudkan “Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah”.

Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., menjadi pembicara utama dalam sesi pembukaan dengan materi bertajuk “Jawa Tengah dalam Konstelasi Ketahanan Nasional”. Dalam ceramahnya, Ace Hasan menekankan bahwa Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari dinamika geopolitik global, tekanan geoekonomi, serta perubahan pola perdagangan internasional. Selain itu, ancaman terhadap sumber daya alam, kejahatan lintas negara, percepatan transformasi digital, dan risiko bencana akibat posisi geografis, dan dampak perubahan iklim turut menambah kompleksitas pembangunan nasional.

“Dunia saat ini sedang mengalami situasi yang tidak baik-baik saja, situasi geopolitik dunia mengalami pergeseran, ketegangan antarkawasan, antarnegara, kemudian perang dagang dan perebutan SDA, harus kita cermati bersama bahwa inilah yang menjadi tantangan bagi kita semua,” tegas Gubernur Lemhannas dalam ceramahnya.

Ace Hasan menjelaskan bahwa perkembangan geopolitik global saat ini menunjukkan pergeseran dari hegemoni unipolar menuju tatanan multipolar. Dalam dinamika hubungan internasional, kecenderungan yang muncul adalah pendekatan realism dan unilateralism. Rivalitas antar negara adidaya ini berdampak pada meningkatnya konflik

regional, seperti perang Rusia–Ukraina, ketegangan Palestina–Israel, instabilitas di Timur Tengah, serta konflik strategis di kawasan Indo-Pasifik.

Salah satu sorotan penting dalam sesi tersebut adalah paparan tentang rendahnya efisiensi pertumbuhan ekonomi Indonesia jika diukur dari Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang mencapai 6,33%. Angka ini jauh di atas kisaran ideal ICOR yang berada antara 3,7-4,6%, sehingga mencerminkan rendahnya efisiensi dalam memanfaatkan potensi wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Dibutuhkan birokrasi yang efisien, kita harus mendorong iklim investasi,



kita harus mendorong kerja sama dan kolaborasi,” ungkap Gubernur Lemhannas agar Jawa Tengah mampu menjadi lebih baik.

Gubernur Lemhannas menekankan bahwa birokrat daerah harus turut mengambil peran dalam mengatasi tantangan tersebut. Menurutnya seluruh pemimpin di daerah dituntut untuk mampu menjadi pemimpin yang pemimpin daerah berkarakter, komprehensif dan adaptif.

“Kita butuh pemimpin daerah yang berkarakter kebangsaan, kita juga butuh pemimpin yang tau dinamika politik global, dan memikirkan bagaimana ketahanan daerahnya,” tegasnya.

Mengakhiri paparannya Gubernur Lemhannas kembali mengingatkan bahwa perangkat daerah memiliki peran strategis sebagai pemimpin dalam mendorong birokrasi yang lebih efisien dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Harus mampu untuk memperkuat kerja sama antar-stakeholder, serta meningkatkan kemampuan adaptasi dan ketahanan terhadap krisis. “Harus saya ingatkan kembali, ketahanan nasional

adalah cerminan dari ketahanan daerah”, pungkas Gubernur Lemhannas.

Retret ini dirancang sebagai ruang pembelajaran strategis dan integratif bagi Wakil Walikota/Bupati, ASN golongan II dan III, Kepala Unit Pelaksana Daerah (UPD), pimpinan dinas dan badan, serta perwakilan BUMD dari seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Selama dua hari pertama, peserta difokuskan pada materi dasar geopolitik dan wawasan kebangsaan, yang menjadi fondasi untuk membentuk mentalitas kepemimpinan yang adaptif dan nasionalis. Selanjutnya, peserta akan diberikan pemahaman mendalam tentang Asta Cita, delapan agenda prioritas pembangunan nasional dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Asta Cita diharapkan dapat dijabarkan secara konkret ke dalam visi dan misi pembangunan daerah, dengan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan.

Menjelang akhir kegiatan, seluruh peserta akan mengikuti program Mancakrida, yakni pelatihan luar kelas berbasis kerja

tim. Kegiatan ini bertujuan memperkuat komunikasi lintas sektor, membangun kekompakan antarpimpinan daerah, serta menyusun strategi kolaboratif untuk menyelesaikan berbagai persoalan lintas sektor di pemerintahan daerah. Mancakrida diposisikan sebagai medium pembentukan jejaring dan penyamaan langkah dalam kerangka satu visi pembangunan.

Lemhannas sebagai lembaga negara yang berperan sebagai leading sector bagi dua proyek prioritas utama yakni Penyelenggaraan Pendidikan Pengkaderan Pemimpin di Tingkat Pusat hingga Tingkat Daerah serta penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, melalui kegiatan ini berharap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat membangun tata kelola pemerintahan yang kompak, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman. Diharapkan, kolaborasi lintas Lembaga dan penguatan kapasitas aparatur sipil negara ini akan menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah dalam lima tahun ke depan.

Konsepsi Cadangan Pangan Nasional di Seluruh Wilayah NKRI Guna Menyiapkan Ketersediaan Pangan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Antisipasi di Masa Perang)

Dalam Rangka Memenangkan Peperangan dengan Bangsa Agresor

Kolonel Laut (KH) Sunarto, S.T., M.AP

Staf Ahli Komando Armada RI

Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis dan memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Wilayah Indonesia mendapatkan penyinaran matahari yang sangat besar ditambah pula dengan daratan yang cukup luas menjadikan Indonesia mempunyai komoditas hasil pertanian yang beragam dan berkualitas (Nurmala, 2012). Karena wilayah Indonesia yang beriklim tropis menjadikan Indonesia sebagai negara agraris dimana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian sampai saat ini masih menjadi perhatian bagi pemerintah. Hal ini disebabkan karena Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang melimpah menjadikan sektor pertanian menjadi salah satu sektor penyumbang devisa negara, yaitu kontribusinya dalam ekspor pangan ke luar negeri.

Selain itu, sektor pertanian juga berperan sebagai sumber pendapatan masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan. (Irmawati, 2018) Pada dasarnya, manusia memiliki kebutuhan pokok untuk hidup, yaitu pangan, sandang, dan papan (Nurmala, 2012). Namun, sebagaimana yang tertuang dalam UU RI Nomor 7 Tahun 1996, bahwa kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki adalah pangan. Pangan adalah kebutuhan manusia yang paling utama karena pemenuhan pangan adalah bagian dari hak asasi individu. Pangan sangat penting dipenuhi bagi setiap individu untuk menciptakan sumber daya manusia yang bermutu. Oleh karena itu, setiap negara lebih mendahulukan kecukupan pangan masyarakatnya sebagai pilar pengembangan sektor lainnya (Ikasari, 2010). Salah satu komoditas pangan yang paling penting untuk pemenuhan kebutuhan adalah

beras. Hal ini dikarenakan beras adalah bahan pokok yang dikonsumsi sebagian besar penduduk Indonesia setiap hari. Berdasarkan data dari USDA, konsumsi beras masyarakat Indonesia sebesar 25,3 juta metrik ton per tahun dan menjadi peringkat keempat dunia negara dengan konsumsi beras terbesar.

Sebuah fakta bahwa tahun 2025 peperangan masih terjadi hingga hari ini di belahan bumi, seakan peperangan tidak mengenal batas waktu, batas wilayah dan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Lalu bagaimana bangsa Indonesia mengantisipasi sejak dini, kondisi-kondisi terburuk yang dapat saja terjadi di masa yang akan datang. Dalam hal ini, penulis lebih fokus kepada ketahanan dan ketersediaan pangan bangsa Indonesia.

Dalam menghadapi tatanan dunia yang secara global pada tahun 2025 telah



mengalami perubahan yang sangat signifikan baik yang terjadi di belahan Eropa utamanya peperangan Rusia dengan Ukraina. Kemudian terjadinya perang di Gaza, terjadinya peperangan di teluk termasuk eskalasi-eskalasi di belahan dunia lainnya. Semua berawal dengan kepentingan, baik kepentingan dalam negeri, pertemanan atau perkumpulan sebuah negara dengan beberapa negara, dengan beberapa aliansi yang menyebabkan adanya kelompok grup maupun blok. Peristiwa-peristiwa tersebut, dalam hal ini peperangan yang terjadi hingga sampai dengan saat ini menunjukkan bahwa perang tidak dilakukan dengan waktu yang singkat dengan kata lain peperangan dapat berlangsung berbulan-bulan bahkan tahunan. Melihat fakta-fakta tersebut, bangsa Indonesia tidak dapat lepas dari ancaman-ancaman perang di masa mendatang.

Bangsa Indonesia memang cinta damai, namun sejarah membuktikan serta mencatat bahwa kita pun pernah berperang melawan penjajah demi untuk bangsa Indonesia bisa merdeka. Saat ini bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka tentunya juga harus realistis memandang serta mempelajari dampak-dampak dan strategi perang di masa mendatang. Dalam hal ini penulis akan membuat sebuah gagasan atau ide mempersiapkan perang yang cukup panjang berdasarkan ketersediaan pangan nasional yang menyeluruh di seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang saat ini memiliki 38 provinsi serta jumlah penduduk menurut Badan Pusat Statistik berjumlah 284.440.000 jiwa.

Swasembada Pangan dan Ketersediaan Pangan.

Target pemerintah dalam bidang pertanian untuk meraih Swasembada pangan sangat perlu didukung. Suksesnya Swasembada pangan akan berakibat positif terutama ketersediaan pangan Nasional menjadi melimpah. Ketersediaan Pangan yang melimpah berdampak juga kepada harga pangan menjadi lebih murah serta dapat terjangkau di lapisan seluruh masyarakat Indonesia. Ketersediaan pangan secara nasional telah komando oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, serta hasilnya terdistribusi kepada rakyat dan stok beras tersimpan oleh Bulog di masa damai.

Pangan yang sudah terkumpul penempatannya dimobilisasi oleh pemerintah pusat dan tersebar ke dalam 38 provinsi, kemudian khusus daerah yang mengkonsumsi pangan tidak beras semisal sebagian Papua sebagian Manado sebagian Ambon juga dipersiapkan untuk stok pangan untuk ketersediaan 1 tahun. Selama tersimpan satu tahun apabila negara dalam posisi aman dan memang tidak ada ancaman perang stok tersebut wajib dikeluarkan ke gudang-gudang Bulog provinsi. Kemudian hasil panen terbarukan dengan jumlah dan volume yang sama dikembalikan ke tempat cadangan nasional tersebut dengan demikian stok pangan nasional untuk darurat perang tersedia kembali dengan alokasi 1 tahun. Sehingga jumlah volume dan ketersediaan benar-benar penuh kembali. Jumlah stok pangan yang ada di seluruh provinsi NKRI berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang ada dan tersebar di provinsi tersebut baik yang ada di pulau-pulau besar, pulau-pulau sedang, pulau-pulau terpencil maupun pulau-pulau terluar sehingga

masyarakat tidak ada satupun warga yang terlewatkan. Demikian halnya dengan keberlangsungan tiap tahun demi tahun, seperti itu perputarannya, jadi lewat 1 tahun barang atau cadangan pangan dikeluarkan atau disalurkan ke Bulog untuk dapat dikonsumsi ke masyarakat, kemudian akan diganti dengan stok dengan volume dan jumlah yang sama. Jadi di sini ada perbedaan antara stok nasional ketersediaan cadangan pangan guna mengantisipasi perang dengan ketersediaan yang ada di Bulog untuk dikonsumsi masyarakat, namun keduanya tetap ada sinerginya.

Tempat Penyimpanan Cadangan Pangan Nasional guna mengantisipasi bila terjadi Perang.

Saat ini, penyimpanan pangan yang lazim berada di Bulog yang tersebar di seluruh daerah, namun demikian, kedepan akan berbeda tempat penyimpanan untuk stok pangan nasional secara darurat yang digunakan untuk cadangan perang. Kami menyarankan ada beberapa alternatif usulan tempat penyimpanan yang dapat digunakan antara lain:

a. Stadion atau sarana olahraga terbesar yang ada dalam sebuah Provinsi.

Potensi pendanaan pemerintah agar supaya tidak terbebani secara besar-besaran diusulkan pemilihan tempatnya adalah stadion. Stadion yang selama ini kita ketahui di atas tanahnya secara umum digunakan untuk perhelatan olahraga-olahraga bermacam cabang, tentunya usulan ini adalah masih di area atau kawasan stadion, di dalam basement stadion, ataupun gedung-gedung yang memang bisa ditempatkan stok pangan secara standar penyimpanan sehingga



● OPINI

lahan yang milik pemerintah kita tidak perlu lagi membelinya atau pembebasan lahan. Kelebihan lain, tempat tersebut pada umumnya lahannya luas, tempat parkir juga luas, besar menampung kapasitas orang, sehingga apabila dalam suasana darurat, sangat tepat untuk berkumpulnya banyak orang, dan keuntungan lain Stadion tersebut memiliki lokasi yang strategis dan akses jalan yang bagus. Itulah saran masukan untuk Stadion dengan segala kelebihannya.

b. Bandara ataupun pelabuhan laut di tiap-tiap daerah atau Provinsi.

Sama halnya dengan stadion, bandara maupun pelabuhan laut memiliki luasan yang sangat besar dan juga masih milik pemerintah. Area area yang seluas tersebut gedung-gedung ataupun gudang-gudang yang nanti akan dipersiapkan baik yang sudah terbangun atau pun dibangun gudang baru sangat memungkinkan. Kelebihan lain aktivitas keluar masuk barang kawasan tersebut sudah sangat familiar. Jadi ini merupakan alternatif yang bisa dipertimbangkan untuk digunakan sebagai tempat dan kawasan penyimpanan stok pangan nasional secara darurat.

Volume ketersediaan Cadangan pangan Nasional.

Jumlah penduduk Indonesia menurut Badan Pusat Statistik tahun 2025 berjumlah 284,44 juta jiwa. Dan masih dari BPS, kebutuhan makan beras perorang dalam satu hari adalah 0.31 kilogram beras per jiwa. (penduduk Indonesia yang secara mayoritas makan beras). Kemudian dalam satu bulan kita bulatkan 30 hari dan dikonsumsi tiap hari selama 12 bulan. Maka secara garis besar bila dihitung Cadangan Pangan selama satu tahun adalah:

$0.31 \text{ kg} \times 30 \text{ hari} \times 12 \text{ bulan} \times 284,44 \text{ juta penduduk}$, sehingga Total kebutuhan beras 31.743.504.000 kg beras dalam satu tahun.

Jadi Lumbung Beras Nasional utk Darurat perang, kalo Pemerintah ingin menabung tiap bulan (di masukkan dalam tempat penyimpanan selama 12 kali) sebanyak = 2.645.292.000 kg atau 2,645 juta ton disimpan tiap bulan.

Jumlahan 2,645 juta ton disimpan tiap bulan, merupakan jumlah yang sangat besar, Cadangan pangan Nasional guna menghadapi perang akan tersebar di 38

Provinsi yang disesuaikan dengan masing-masing jumlah penduduknya.

Produksi beras secara Nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 16,62 juta ton pada Januari sampai Mei 2025. Dikutip dari laporan BPS, Selasa (8/4/2025), prediksi produksi beras tersebut naik 1,83 juta ton atau 12,40 persen dibandingkan produksi beras pada Januari sampai Mei 2024 yang tercatat sebesar 14,78 juta ton. Sementara itu, produksi padi pada Februari 2025 diperkirakan setara 2,23 juta ton beras. Angka ini naik 0,84 juta ton atau 60,82 persen dibandingkan Februari 2024 yang mencapai 1,39 juta ton.

Indonesia mencatat surplus beras sebesar 2,5 juta ton pada periode Januari-April 2025, menjadikan stok beras nasional sebagai yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Hal ini berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas).

Menurut data BPS, produksi beras nasional selama Januari-April 2025 diperkirakan mencapai 13,95 juta ton. Meningkatnya produksi beras ini didorong oleh panen raya yang berlangsung pada Maret hingga April serta upaya pemerintah

dalam meningkatkan produksi pangan nasional. Pada Februari 2025, luas panen padi sebesar 0,76 juta hektare dengan produksi padi diperkirakan sebesar 3,88 juta ton gabah kering giling (GKG).

Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi beras pada Februari 2025 diperkirakan sebesar 2,23 juta ton. Adapun Produksi Padi dan Beras Menurut Provinsi, tahun 2024, tercantum pada tabel 1.

Cadangan pangan Nasional guna menghadapi perang akan tersebar di 38 Provinsi yang disesuaikan dengan masing-masing jumlah penduduknya. Lumbung Beras Nasional utk Darurat perang, kalau Pemerintah ingin menabung tiap bulan (di masukkan dalam tempat penyimpanan selama 12 kali) sebanyak = 2.645.292.000 kg atau 2,645 juta ton disimpan tiap bulan.

Melihat pencapaian hasil Produksi Padi dan Beras Menurut Provinsi, tahun 2024, penulis merasa optimis untuk ketersediaan Cadangan pangan Nasional di seluruh wilayah NKRI dapat terpenuhi, sekalipun pada awal-awal perencanaan jumlahnya tidak sekaligus terpenuhi 100 persen, namun secara bertahap dapat terpenuhi, dengan skema di masukan tempat penyimpanan setiap bulan.

No	Provinsi	Produksi Padi (Ton)	Produksi Beras (ton)
1	Aceh	1.659.966,28	956.278,09
2	Sumatera Utara	2.204.875,51	1.264.752,48
3	Sumatera Barat	1.356.467,93	785.425,72
4	Riau	222.055,71	127.438,73
5	Jambi	281.022,05	162.563,90
6	Sumatera Selatan	2.909.411,67	1.670.744,56
7	Bengkulu	272.848,55	157.151,04
8	Lampung	2.791.347,53	1.604.614,06
9	Kepulauan Bangka Belitung	77.489,79	45.930,55
10	Kepulauan Riau	305,09	174,59
11	DKI Jakarta	2.306,54	1.359,57
12	Jawa Barat	8.626.879,91	4.981.868,86
13	Jawa Tengah	8.891.297,05	5.113.021,60
14	DI Yogyakarta	452.831,77	257.219,86
15	Jawa Timur	9.270.435,29	5.352.936,04
16	Banten	1.550.623,46	883.128,02
17	Bali	635.473,35	358.378,78
18	Nusa Tenggara Barat	1.453.408,37	827.788,45
19	Nusa Tenggara Timur	707.792,54	414.576,01

No	Provinsi	Produksi Padi (Ton)	Produksi Beras (ton)
20	Kalimantan Barat	764.784,15	452.439,81
21	Kalimantan Tengah	366.146,82	217.495,56
22	Kalimantan Selatan	1.029.567,93	609.172,41
23	Kalimantan Timur	249.642,90	145.209,36
24	Kalimantan Utara	30.079,77	17.832,41
25	Sulawesi Utara	273.134,94	153.483,66
26	Sulawesi Tengah	761.936,39	449.754,96
27	Sulawesi Selatan	4.818.429,39	2.764.990,01
28	Sulawesi Tenggara	555.836,08	319.205,15
29	Gorontalo	234.862,88	131.138,53
30	Sulawesi Barat	318.876,59	183.138,80
31	Maluku	91.125,35	51.031,04
32	Maluku Utara	31.232,95	17.478,19
33	Papua Barat	20.729,15	12.455,13
34	Papua Barat Daya	988,64	594,02
35	Papua	4.609,95	2.632,19
36	Papua Selatan	217.789,62	124.355,12
37	Papua Tengah	6.072,38	3.467,26
38	Papua Pegunungan	42,38	24,2
	Indonesia	53.142.726,65	30.621.248,72

Tabel 1. Produksi Padi dan Beras Menurut Provinsi, tahun 2024, Sumber BPS

Kesimpulan dan Saran.

a. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian juga perlu menerapkan kebijakan-kebijakan atau inovasi-inovasi yang sekiranya bisa meningkatkan produktivitas beras dalam negeri sehingga bisa mengurangi jumlah impor dan bisa mencapai swasembada beras sehingga dapat mendorong hilirisasi di Industri pertanian yang tentunya

akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa depan seperti meningkatkan skill SDM pertanian, membangun sarana dan prasarana serta penggunaan teknologi di sektor pertanian.

b. Pemerintah masih terus perlu membuka luas pertanian yang baru di seluruh wilayah NKRI, dengan menyesuaikan tingkat kesuburan dan musim di wilayah

tersebut bekerja sama dengan Lembaga terkait yang berkompeten.

c. Adapun pra-anggapan kemungkinan akan terjadinya perang di Indonesia sangat kecil, namun tetap sejak dini perlu diantisipasi, sehingga negara Indonesia akan lebih siap dalam menghadapi dinamika global, termasuk penyiapan software SOP dalam kondisi darurat Nasional yang disusun dan dibuat oleh para Ahli dari semua Pakar Bangsa.

d. Perlu disimulasikan kondisi-kondisi kegawat-daruratan di seluruh wilayah NKRI, sehingga seluruh elemen bangsa Indonesia dapat mensikapi dengan bijak, terlebih telah dipersiapkan SOP.

e. Dengan memahami dan menjiwai situasi bahaya perang yang kemungkinan bisa terjadi kapanpun di Indonesia, kemudian kita selaku rakyat Indonesia dapat mengantisipasi dengan baik, terencana dengan sistematis, dan ini merupakan salah satu cerminan bagian dari Kita rakyat Indonesia sangat Mencintai Tanah Air Indonesia.

Penutup

Demikian gagasan kecil yang dapat saya persembahkan untuk negeri tercinta Indonesia, terutama dalam bidang pangan dalam kondisi darurat perang, tentunya dengan kesadaran diri, tulisan ini jauh dari kata sempurna, semoga ada pihak lain yang lebih pakar, untuk merevisi dan menjadikan gagasan ini lebih bermakna dan dapat berkelanjutan.



Foto. bulog.co.id



Kepemimpinan Inklusif dan Transformasional

Dalam Mengoptimalkan Potensi Digital Nomadis di Era Bonus Demografi

Dr. Ririt Yuniar, S.Sos., M.Hum.

Tenaga Profesional Bidang Demografi Lemhannas RI

Indonesia sedang berada dalam era bonus demografi dengan proporsi penduduk usia produktif telah mencapai puncaknya dan membuka peluang untuk percepatan pembangunan nasional. Fenomena ini perlu dikelola dengan tepat agar dapat menjadi modal besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Namun, terdapat tantangan yang timbul ketika generasi muda kini beradaptasi dengan pola kerja baru yang bersifat fleksibel dalam dunia digital, seperti gaya hidup digital nomad. Digital nomad adalah individu yang mampu bekerja secara remote dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menyelesaikan tugas-tugasnya tanpa terikat ruang dan waktu (Wahono dkk., 2025). Produktivitas tetap tercapai dengan cara kerja yang lebih efektif dan efisien ini perlu dikembangkan dalam institusi ataupun lembaga. Terlebih di tengah kondisi efisiensi anggaran yang terjadi di Indonesia.

Dalam konteks ini, kepemimpinan nasional menjadi krusial. Kepemimpinan yang memiliki sifat inklusif dan transformasional dibutuhkan untuk menciptakan kebijakan

yang adaptif terhadap perubahan zaman, mampu merangkul keberagaman gaya hidup generasi muda, serta meningkatkan daya saing ekosistem digital. Kepemimpinan yang inklusif menjamin keterlibatan seluruh entitas dalam proses pembangunan dan kepemimpinan transformasional diharapkan mampu untuk memberikan inspirasi serta mengakomodir perubahan struktural yang inovatif sesuai perkembangan zamannya. Oleh karena itu, karakteristik dan peran kepemimpinan yang visioner harus mampu mengoptimalkan potensi generasi digital nomadis sebagai kekuatan produktif utama dalam era bonus demografi. Potensi digital nomadis yang berbasis pada sumber daya manusia adaptif, dan berdaya saing global diharapkan dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Tren digital nomad—pekerja yang bekerja jarak jauh dengan bantuan teknologi—makin populer berkat



kemajuan internet, alat kolaborasi daring, dan fleksibilitas kerja. Model kerja ini menawarkan keuntungan seperti efisiensi waktu, peningkatan produktivitas, dan penghematan biaya bagi pekerja maupun perusahaan. Beberapa negara diantaranya: Pertama, Lisbon yang ramah terhadap digital nomad menawarkan kombinasi biaya hidup terjangkau, infrastruktur mendukung, dan komunitas digital nomad tinggi; Kedua, Thailand terutama kota Chiang Mai memiliki komunitas digital nomad yang ramai; Ketiga, Meksiko menawarkan makanan maupun lingkungan hijau yang cocok bagi pekerja digital nomad; Keempat, Indonesia dengan berbagai macam budaya, bahasa, dan sumber daya alam yang kaya, indah, menjadi daya tarik para digital nomad yang mencari pengalaman santai sekaligus produktif saat bekerja; Kelima, Spanyol dengan anggur dan ombaknya; Keenam, Argentina dengan biaya hidup yang murah dan nyaman; Ketujuh, Afrika Selatan dengan pegunungan subur sekaligus pantai yang indah; serta Kedelapan, Kolombia sebagai pusat digital nomad karena menawarkan peluang untuk bersosialisasi (Kompas.com, 2024).

Tren ini meningkat sejak pandemi COVID-19, terutama di Bali, Indonesia, yang mengubah Bali dan kebudayaannya seperti transformasi tanah suci maupun pohon suci menjadi villa bagi para digital nomad (ABC News, 2022). Selain itu, terdapat tantangan yang dihadapi digital nomad mencakup kesepian sosial, manajemen waktu maupun disiplin waktu kerja, menavigasi hukum dan aturan ketenagakerjaan setiap negara yang berbeda (Msbu.co.id, 2025), termasuk melemahkan nilai-nilai humanis pada karakter pribadi personal tertentu. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan budaya masyarakat Indonesia yang juga masih mengutamakan hubungan sosial kemasyarakatan yang lebih guyup, solid, dan menghormati adat istiadat beragam. Nilai-nilai karakter kebangsaan perlu dikuatkan dalam menghadapi transformasi digital. Internalisasi nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam lini kehidupan.

Negara yang telah mengadopsi visa khusus untuk pekerja jarak jauh atau digital nomad, dengan mengizinkan individu untuk tinggal dan bekerja secara legal di negara tersebut tanpa harus menjadi penduduk tetap yaitu Jepang, Indonesia, Taiwan, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab (Tempo.co, 2024). Inisiatif ini bertujuan untuk menarik para profesional digital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kontribusinya dalam mengembangkan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan berbagai hal yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini perlu menjadi perhatian dan mungkin dapat dikembangkan agar bermanfaat, serta perlu ditinjau dari berbagai

perspektif yang lebih luas agar memperkaya sudut pandang dalam kreativitas pekerja dapat meningkatkan produktivitas maupun capaian kinerja lebih efektif. Data ini dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan penyerapan pekerja guna menurunkan nilai pengangguran dengan cara merekrut pekerja secara digital nomad termasuk bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Sejalan dengan itu, perlu tetap untuk mengembangkan meritokrasi meskipun dilakukan dengan digital nomad.

Pradityo dan Pancaningsih (2025) menjelaskan bahwa meritokrasi dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Meritokrasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik apabila berfokus pada kualifikasi, kompetensi, serta prestasi kerja dalam rekrutmen dan promosi jabatan. Dalam pelaksanaannya, sistem merit masih memiliki tantangan berupa resistensi budaya organisasi, intervensi politik, keterbatasan kompetensi ASN, serta kurangnya transparansi dalam proses seleksi dan promosi jabatan. Oleh karena itu perlu dilakukan beberapa strategi dalam penerapan sistem merit, antara lain: Pertama, memberikan kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan (kompetensi ASN); Kedua, perubahan budaya birokrasi agar pegawai memiliki orientasi kerja yang jelas berdasarkan mekanisme kerja maupun sistem birokrasi yang sehat; Ketiga, bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada posisi maupun jabatan yang diembani; Keempat, manajemen talenta berbasis merit juga perlu dioptimalkan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik agar mampu mewujudkan sistem birokrasi yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat; serta Kelima, transformasi manajemen ASN atau pegawai yang bersih, kompeten, melayani secara adil sekaligus terbuka, serta perlu memberikan hak yang setara dan menghargai kinerja dengan capaian produktivitasnya.

Namun demikian, berbeda halnya dengan pandangan Tan (2023) yang membahas kritik terhadap meritokrasi dalam konteks pendidikan. Meritokrasi, yang secara teoritis menjanjikan keadilan melalui penghargaan berdasarkan prestasi individu, dalam praktiknya justru memperkuat ketimpangan sosial. Sistem ini mengabaikan kenyataan bahwa akses terhadap pendidikan dan kesempatan berprestasi sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi. Alih-alih menciptakan ruang yang setara, meritokrasi sering kali menjadi legitimasi baru bagi dominasi kelompok-kelompok yang sudah mapan. Mereka yang memiliki

modal sosial dan kultural lebih besar akan lebih mudah memenuhi kriteria “berprestasi”, sementara yang lain semakin tertinggal. Tan menunjukkan bahwa meritokrasi dalam dunia pendidikan memperhalus bentuk kekuasaan yang eksploitatif. Melalui mekanisme penilaian objektif seperti ujian dan ranking, sistem ini tampak adil di permukaan, namun sebenarnya menyembunyikan relasi kuasa yang timpang. Pendidikan menjadi alat reproduksi struktur sosial yang tidak adil, karena yang dianggap “layak” atau “berprestasi” ditentukan oleh standar yang ditetapkan oleh kelompok dominan. Menjadi sebuah dilema diksi “unggul” identik lebih dari yang lainnya (lebih hebat, lebih pintar, lebih cerdas, lebih bijak dan lebih berkarakter) sebuah keniscayaan menciptakan SDM unggul yang ber hikmat dan bijaksana di tengah dinamika global.

Perkembangan global menunjukkan pergeseran besar dalam lanskap tenaga kerja, yang ditandai oleh tumbuhnya komunitas digital nomad — individu yang bekerja jarak jauh berbasis teknologi tanpa keterikatan lokasi. Negara-negara maju dan berkembang telah menangkap peluang ini dengan mengeluarkan kebijakan visa digital nomad sebagai strategi untuk menarik talenta internasional, mendongkrak devisa negara, dan memperkuat ekosistem ekonomi lokal, terutama di sektor pariwisata serta ekonomi kreatif. Indonesia telah bergabung dengan inisiatif ini, memosisikan destinasi seperti Bali sebagai magnet utama digital nomad global. Namun, untuk mengubah fenomena ini menjadi keuntungan strategis jangka panjang, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pembangunan SDM unggul. Visa digital nomad seharusnya tidak hanya dilihat sebagai instrumen promosi pariwisata premium, melainkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based- economy) yang terintegrasi dengan program nasional untuk meningkatkan kapasitas talenta lokal. Sebagaimana menjadi sasaran Visi Indonesia Digital Indonesia 2045 mengenai infrastruktur digital, ekonomi digital, masyarakat digital, serta pemerintah digital (Kominfo, 2025).

Bonus demografi yang saat ini dialami Indonesia, dengan proporsi penduduk usia produktif yang sangat tinggi, terdapat tantangan besar yang harus dijawab: Bagaimana memastikan populasi produktif ini tidak hanya besar dalam jumlah, tetapi juga unggul dalam kualitas? Jika dihadapkan dengan laporan World Economic Outlook April 2024 oleh Dana Moneter Internasional (IMF), Indonesia tercatat tingkat pengangguran tertinggi di antara enam negara Asia Tenggara, yaitu sebesar 5,2% per April 2024. Angka ini hanya

mengalami penurunan 0,1% dibandingkan tahun sebelumnya (5,3% pada 2023). Dibanding tingkat pengangguran di negara-negara ASEAN lainnya pada periode yang sama antara lain: Filipina: 5,1%, Malaysia: 3,5%, Vietnam: 2,1%, Singapura: 1,9%, Thailand: 1,1% (Kompas.com, 2025). Fakta dari laporan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran Indonesia (5,2%) tertinggi di Asia Tenggara menandakan adanya disonansi antara potensi demografis dan kondisi struktural pasar kerja. Tanpa ekosistem ekonomi yang terbuka, dinamis, dan berorientasi pada inovasi, bonus demografi berisiko menjadi beban sosial-ekonomi. Di sinilah peran digital nomad menjadi relevan dan strategis. Mereka dapat menjadi jembatan antara ekosistem lokal dengan jejaring global — membawa praktik kerja digital, literasi teknologi, hingga pola pikir profesional modern yang dapat ditularkan kepada talenta lokal melalui program kolaborasi, inkubasi start-up, pelatihan, serta pembelajaran lintas budaya. Namun, proses transfer teknologi dan pengetahuan ini hanya akan terjadi jika ada kepemimpinan nasional yang membuka ruang partisipatif dan mendorong pertukaran pengetahuan — bukan sekadar mengandalkan keuntungan jangka pendek dari sektor konsumtif.

Kebijakan yang mendukung integrasi digital nomad dengan komunitas lokal juga harus dilengkapi dengan pembenahan birokrasi yang progresif. Namun, meritokrasi harus dikontekstualisasikan dengan mempertimbangkan ketimpangan akses pendidikan, literasi digital, dan kesenjangan infrastruktur antardaerah. Jika dilakukan secara menyeluruh, meritokrasi dapat melahirkan birokrasi yang profesional, responsif terhadap perubahan global, dan berorientasi pada pelayanan publik yang adaptif terhadap ekonomi digital. Lebih dari itu, Indonesia harus mengembangkan strategi nasional penguatan SDM unggul berbasis pendekatan transformatif yang tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pada penguatan karakter, kreativitas, kolaborasi lintas budaya, serta ketahanan sosial. Ini berarti membangun ekosistem pembelajaran sepanjang hayat yang melibatkan negara, sektor swasta, komunitas global seperti digital nomad, dan institusi pendidikan.

Transformasi kerja berbasis digital dan fenomena digital nomad bukan sekadar tren teknologi, tetapi realitas ekonomi baru yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam peta daya saing global. Untuk mewujudkannya, Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang inklusif, progresif, dan berorientasi masa depan — mampu menghubungkan

kebijakan visa dengan pembangunan SDM, mengintegrasikan talenta global dengan mengoptimalkan potensi lokal, serta mereformasi birokrasi sehat, simple, dan berintegritas agar mampu menjadi fasilitator ekonomi digital yang transparan, akuntabel, dan adaptif. Dengan demikian, bonus demografi akan menjadi peluang nyata untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Jika melihat fakta dan analisis tersebut di atas, maka perlu rekomendasi langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain: Pertama, membangun Ekosistem Kolaboratif Global-Lokal (Glokal) dengan upaya (1) Mendirikan Digital Nomad Hubs di kota-kota strategis seperti Bali, Yogyakarta, atau Labuan Bajo, dengan fasilitas digital, komunitas profesional, dan pusat pelatihan terpadu. (2) Menjalin kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha lokal, dan digital nomad untuk program mentoring, pelatihan start-up, atau proyek berbasis komunitas. (3) Mengembangkan SDM Lokal melalui Program Skill Bridging. (4) Mengadakan pelatihan intensif (bootcamp) berbasis kebutuhan industri digital (UI/UX, data, remote project management) untuk generasi muda dan pencari kerja; Kedua, menyusun Peta Jalan Nasional "Ekonomi Digital Inklusif" dengan upaya (1) Menetapkan roadmap nasional untuk memanfaatkan kerja jarak jauh sebagai bagian dari transformasi ketenagakerjaan, sejalan dengan target Indonesia Emas 2045. (2) Menyelaraskan kebijakan sektor pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan transformasi digital untuk mendukung lahirnya SDM unggul global. (3) Sinergi antar Institusi terkait dengan leading sektor yang mengawaki melalui kementerian teknis terkait, akademisi, media, tokoh agama maupun tokoh masyarakat, serta pelaku usaha yang memiliki idealisme dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila; Ketiga, dibutuhkan karakter pemimpin negarawan yang inklusif dan transformasional mampu mengelola Indonesia dengan potensi kearifan lokal yang Bhinneka dengan upaya (1) tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan (SARA). (2) Membuka ruang dialogis untuk mampu berpikir kritis sesuai logika common sense dengan mengelaborasi modal digital, ketrampilan digital dan digital nomad menjadi sebuah kebiasaan baru yang produktif. (3) Menghapus sistem patronase atau "politik dagang sapi" (memberikan jabatan, kontrak, dukungan politik, maupun loyalitas terhadap kelompok tertentu tanpa memperhatikan kompetensi dan kualitasnya) yang dapat menyebabkan ketidakadilan, potensi korupsi, kolusi, nepotisme. Nilai-nilai ketulusan dan kemurnian hati untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan

golongan harus terinternalisasi dalam setiap pribadi, sehingga meritokrasi dapat terwujud.

Referensi:

ABC News. (2022, September 15). Indonesia Meresmikan Skema Visa Khusus "Digital Nomad" di Tengah Bertambahnya Minat Kerja dari Bali. *Abc.net.au*. <https://www.abc.net.au/indonesian/2022-09-15/digital-nomad-di-bali-semakin-diminati/101442584>

Kominfo. (2025). *Visi Indonesia Digital 2045 (1 ed.)*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Lia, H. (2025, Maret 8). *Gaya Hidup Digital Nomad: Kebebasan atau Tantangan Baru?* *Msbu.co.id*. <https://msbu.co.id/blog/gaya-hidup-digital-nomad-kebebasan-atau-tantangan-baru>

Pradityo, R. Y., & Pancaningsih. (2025). *Peran Meritokrasi melalui Manajemen Talenta pada Instansi Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. *Jurnal Kelitbangan*, 13(1), 29–40. <https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/>

Prodjo, W. A. (2025, April 30). *Laporan IMF: Indonesia Nomor 1 Tingkat Pengangguran Tertinggi di ASEAN*. *Kompas.com*. https://www.kompas.com/edu/read/2025/04/30/145625071/laporan-imf-indonesia-nomor-1-tingkat-pengangguran-tertinggi-di-asean#google_vignette

Siella, M. A. L., & Prasetya, A. W. (2024, Februari 1). *8 Negara Terbaik untuk Digital Nomad, Ada Indonesia dan Thailand*. *Kompas.com*. <https://travel.kompas.com/read/2024/02/01/213100127/8-negara-terbaik-untuk-digital-nomad-ada-indonesia-dan-thailand>

Tan, P. (2023). *Tirani Meritokrasi dan Reimajinasi Solidaritas: Sebuah Kajian Berdasarkan Perspektif Michael Sandel*. *Jurnal Ledalero*, 22(1), 1–19. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31385/jl.v22i1.332.1-19>

Tempo.co. (2024, Juni 26). *40+ Negara yang Mengeluarkan Digital Nomad Visa, Indonesia Termasuk*. *www.tempo.co*. <https://www.tempo.co/hiburan/40-negara-yang-mengeluarkan-digital-nomad-visa-indonesia-termasuk-45725>

Wahono, P., Usman, O., Arofani, A. B., Leonora, M., Arliuca Leizi Ann, Nugroho, D. Y., Reza, M. F., Maula, Z. N., Alkatiri, N. F., Islam, S., Siwi, R. P., Sudarsih, S., Falah, R., Azizy, F. N., & Limbong, J. A. (2025). *Digital Nomad di Era Jarak Jauh: Tren dan Strategi* (P. Wahono & O. Usman, Ed.; 1 ed.). *Widina Media Utama*.

Implementasi Nilai Toleransi, Harmonisasi dan Gotong Royong Melalui Sertifikasi Halal di Tengah Tantangan Geopolitik Global dalam Rangka Mendukung Astacita

Himmel Sihombing, S.T., M.Sc. dkk*

Alumni Program Pemanjapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan Ke-220
Kolaboratif Lemhannas RI Tahun 2025

Di tengah perubahan tatanan global yang semakin tidak menentu, Indonesia menghadapi tekanan dan tantangan geopolitik yang kompleks, tidak hanya mengguncang aspek ekonomi dan politik, tetapi juga mengancam kohesi sosial dan kepercayaan publik. Sebagai negara dengan keberagaman tinggi, penguatan fondasi sosial seperti toleransi dan gotong royong menjadi penting untuk menjaga ketahanan nasional. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis nilai lokal menjawab tantangan global menjadi sangat relevan. Salah satunya adalah sistem sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi nasional dalam mewujudkan masyarakat berkeadilan dan berdaya saing. Upaya ini sejalan dengan ASTACITA oleh Presiden Prabowo Subianto. Sertifikasi halal yang terintegrasi dapat memperkuat ketahanan pangan, memperluas perdagangan internasional, dan memperkokoh diplomasi ekonomi Indonesia sesuai semangat Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 dengan konsep Archipelagic State melalui UNCLOS 1982.

Geopolitik Global dan Dampaknya terhadap Indonesia

Dalam dua dekade terakhir, dunia memasuki era multipolaritas, ditandai dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru yang menantang dominasi negara-negara adidaya. Konflik Rusia-Ukraina, rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta

ketegangan di Asia-Pasifik menggambarkan betapa kompleks dan rentannya konstelasi geopolitik global saat ini. Sementara itu krisis iklim, pandemic global, gangguan rantai pasok akibat konflik regional semakin memperburuk ketahanan energi dan pangan dunia. Indonesia, sebagai negara berkembang, turut terdampak melalui fluktuasi harga komoditas, tekanan terhadap neraca perdagangan dan kesenjangan sosial serta polarisasi identitas. Dalam konteks ekonomi global, State of the Global Islamic Economy Report 2023 mencatat bahwa sector halal global terus tumbuh dan diproyeksikan mencapai USD 7,7 triliun pada 2025, mencakup makanan, farmasi, kosmetik, keuangan syariah dan pariwisata. Bagaimana Consumer Opportunity dan Trade Opportunity seperti pada Gambar 1.

Untuk merespon berbagai tantangan tersebut, Indonesia perlu memperkuat strategi pembangunan berbasis nilai-nilai lokal yang adaptif dengan nilai toleransi, harmonisasi dan gotong royong.

Sertifikasi Halal sebagai Respon Strategis Sosioekonomi

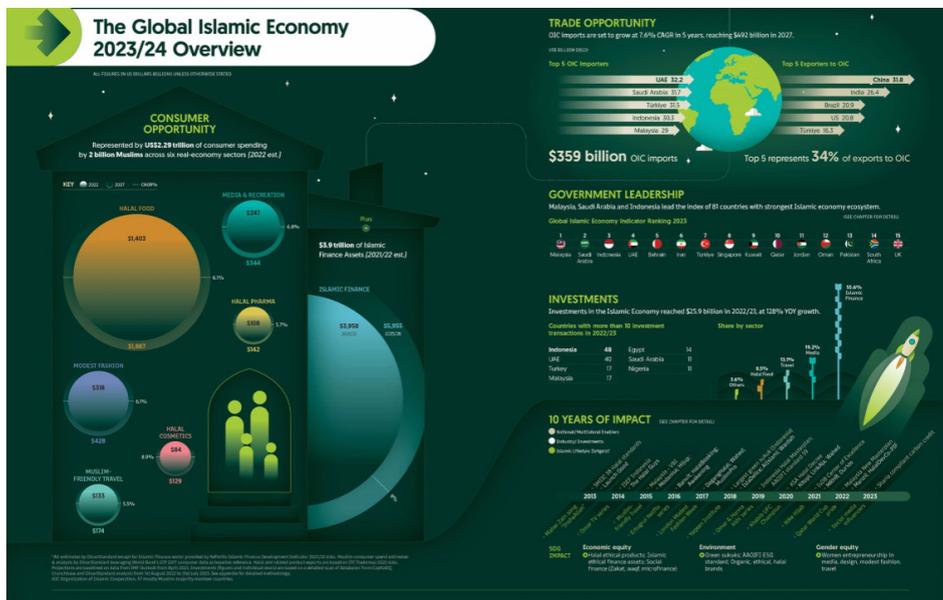
Sertifikasi halal kini telah berevolusi dari sekadar instrumen keagamaan menjadi sistem nilai universal yang mengedepankan keadilan sosial, etika bisnis, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam perspektif Islam, konsep halal tidak hanya mengatur keabsahan hukum, tetapi juga

mencakup prinsip moral seperti kejujuran, tanggung jawab, serta perlindungan terhadap konsumen. Prinsip *thayyib* menguatkan bahwa produk halal tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga harus aman, sehat, dan ramah lingkungan. Dengan demikian, halal menjadi fondasi dari praktik ekonomi etis yang menjunjung tinggi integritas dan keberlanjutan dalam rantai pasok. Di Indonesia, keberadaan sertifikasi halal menjadi semakin strategis sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Implementasinya telah merambah berbagai sektor, mulai dari industri makanan dan minuman, keuangan syariah, logistik, hingga pariwisata. Bagi UMKM, sertifikasi halal membuka akses pasar domestik dan internasional. Bagi konsumen, label halal menjadi penanda kualitas dan kepercayaan, bahkan lintas agama. Selain itu, halal juga menjadi instrumen diplomasi memperkuat posisi Indonesia sebagai industri halal global.

Toleransi, Harmonisasi dan Gotong Royong dalam Konteks Halal

Sistem sertifikasi halal di Indonesia mencerminkan semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor yang menjadi bagian dari budaya nasional. Proses sertifikasi ini melibatkan BPJPH sebagai regulator, MUI sebagai pemberi fatwa, pelaku usaha sebagai produsen, dan masyarakat sebagai pengguna serta pengawas informal. Model tata kelola partisipatif ini tak hanya menjamin kualitas produk, tetapi juga memperkuat kohesi





Gambar 1. State of the Global Islamic Economy Report 2023

sosial lewat tanggung jawab bersama atas kehalalan dan penerimaan masyarakat.

Lebih jauh, halal bukan sekadar kepatuhan terhadap norma agama, melainkan telah menjadi simbol etika global yang diterima lintas agama dan budaya. Di berbagai negara, produk halal identik dengan kebersihan, kesehatan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Halal menjadi jembatan sosial yang memperkuat inklusivitas dan toleransi antar komunitas. Dengan mengintegrasikan nilai spiritual, sosial, dan ekonomi, sistem halal membentuk ekosistem partisipatif yang berorientasi pada kemaslahatan. Nilai harmonisasi berkaitan erat dengan prinsip keseimbangan, keselarasan, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks sertifikasi halal, harmonisasi terwujud dalam upaya menyelaraskan nilai-nilai keagamaan, norma sosial, serta standar etika dan kualitas produk yang dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.

Sertifikasi halal tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga mengedepankan prinsip *tahayyi* (baik), yang mencakup aspek kebersihan, keamanan, dan tanggung jawab sosial. Hal ini sejalan dengan semangat harmonisasi, karena produk halal dirancang agar dapat diterima secara luas tanpa menciptakan eksklusivitas atau segregasi budaya. Masyarakat majemuk, produk halal menjadi simbol inklusivitas. Lebih jauh, proses sertifikasi halal melibatkan kolaborasi lintas sector pemerintah, ulama, pelaku usaha, dan masyarakat yang mencerminkan harmoni dalam tata kelola. Dengan demikian, sertifikasi halal bukan hanya instrumen keagamaan atau ekonomi, tetapi nilai harmonisasi sosial.

Astacita Sebagai Tujuan Strategis

Nilai-nilai lokal seperti halal, toleransi, dan gotong royong menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan nasional

tidak sekadar bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada memperkuat karakter bangsa sebagaimana tergambar dalam kerangka Astacita.

Halal sebagai bagian dari sistem etika kehidupan membawa prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan profesionalisme dalam produksi dan konsumsi. Bersama dengan toleransi dan gotong royong, halal mendorong kohesi sosial, memperkuat identitas nasional yang terbuka, serta menjadi kekuatan kolektif dalam pemberdayaan masyarakat. Integrasi nilai-nilai ini ke dalam kebijakan publik menjadikan pembangunan Indonesia lebih berakar pada jati diri bangsa. Dengan menjadikan halal sebagai bagian dari strategi Astacita.

Simpulan dan Saran

Sistem sertifikasi halal terbukti menjadi salah satu pendekatan strategis dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang mencerminkan nilai-nilai universal seperti keadilan, transparansi, keberlanjutan, serta menjunjung tinggi prinsip toleransi, harmonisasi, dan gotong royong. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai label keagamaan, tetapi telah berkembang menjadi instrumen etika dan diplomasi ekonomi yang memperkuat di tingkat global. Sertifikasi halal sejalan dengan ASTACITA arah Strategis Pembangunan Indonesia menuju 2045 dengan nilai-nilai yang diusung dalam ekosistem halal mendukung penguatan kohesi sosial, ketahanan pangan, perluasan pasar, dan berkelanjutan dan relevan dengan semangat Deklarasi Djuanda konsep negara kepulauan pada geopolitik dunia.

Pemerintah bersama pemangku kepentingan perlu mengembangkan ekosistem halal secara lebih integratif, tidak hanya berfokus pada sertifikasi produk, tetapi juga pada aspek edukasi publik, pendampingan pelaku usaha, dan penguatan regulasi yang inklusif

serta adaptif (Penguatan Ekosistem Halal secara Terpadu). Mengingat besarnya potensi UMKM dalam ekonomi nasional, perlu strategi afirmatif untuk mempercepat proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil (Akselerasi Sertifikasi Halal UMKM). Indonesia harus lebih aktif memosisikan diri sebagai pusat industri halal dunia melalui diplomasi halal yang memperkuat posisi dalam organisasi internasional, forum dagang, dan kerja sama (Halal sebagai Soft Diplomacy). Pemerintah disarankan menjadikan nilai-nilai lokal seperti toleransi, gotong royong, dan harmonisasi sebagai kerangka dasar dalam perumusan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah, pangan, perdagangan, dan pendidikan multicultural (Integrasi Nilai Lokal dalam Kebijakan Nasional). Diperlukan sistem pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas sertifikasi halal sebagai instrumen sosial-ekonomi, agar dampaknya dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif dalam mendukung agenda ASTACITA (Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan).

Daftar Pustaka

Ananta, A., & Arifin, E. N. (2015). *Demography of Indonesia's Ethnicity*. Singapore: ISEAS Publishing.

Anwar, M. (2019). *Halal diplomacy: Indonesia's soft power strategy in global halal market*. *Journal of Islamic World Studies*, 3(2), 85–98.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2021). *Laporan Kinerja BPJPH 2021*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Friedberg, A. L. (2011). *A Contest for Supremacy: China, America, and the Struggle for Mastery in Asia*. New York: W. W. Norton & Company.

Kim, S. (2022). *Geopolitical risk and food security: Evidence from emerging economies*. *Journal of International Affairs*, 75(2), 89–104.

Rahman, F. (2020). *Halal ecosystem and the global market: Ethics, trust, and strategic value*. Jakarta: Islam Nusantara Institute.

Setyawan, E., & Kholil, M. (2021). *Gotong royong dalam sistem sertifikasi halal di Indonesia: Perspektif sosiologi agama*. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 221–238.

Zailani, S., Arrifin, Z., Wahid, N. A., Othman, R., & Fernando, Y. (2015). *Halal traceability and halal tracking systems in strengthening halal food supply chain*. *Journal of Food Products Marketing*, 21(6), 655–676. <https://doi.org/10.1080/10454446.2013.837809>

*Tim Penulis: Himmel Sihombing, S.T., M.Sc.; Dra. Anita Priyanti, MBA.; Jonathan Steven Mulia; Rocky Sudhanta; Anselmus Serath; Willem Thobias Fofid, S.Si.T., M.Pi.; Dr. Evan Utama Tjandra, M.Sc.; Kenny Wijaya Limsar; S Ramelan, S.H.; Dr. Dofa Purnomo, S.E., M.S.M.; Ivan Philipus, M.Th.; Michael George; H. Deni Salahuddin, SH., SE., MM.; Drh. Ratni Ernita; Eka Ratna Putri, S.H.



Brigadir Jenderal Polisi

Udin Zainudin S.I.K., M.H.

"...jaga etika, saling hormat, dan jangan anggap diri lebih tinggi..."

Brigjen Pol. Udin Zainudin, S.I.K., M.H. merupakan putra daerah asal Bogor, yang lahir di Kabupaten Bogor pada 10 Januari 1971 dan besar di kawasan Jonggol. Pendidikan dasar ia tempuh di SD Negeri Raweuy, Kecamatan Jonggol, lulus tahun 1985; lalu melanjutkan ke SMP Negeri Jonggol (1988), dan menamatkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri Jonggol pada tahun 1991. Sejak kecil, ia telah menanamkan cita-cita menjadi seorang prajurit TNI. "Saya selalu kagum melihat sosok berseragam dengan loreng dan baret. Di kampung saya, mereka adalah simbol kehormatan," kenangnya.

Terkait motivasi awalnya untuk mengabdikan sebagai abdi negara, Brigjen Pol. Zainudin menegaskan, "Tidak ada yang memaksa. Saya sendiri yang ingin mengabdikan. Kakak saya sudah kuliah lebih dulu, dan saya tidak mau menambah beban orang tua. Saya ingin mandiri dan bisa memberi kembali kepada negara."

Dukungan moral datang dari pamannya, Saifudin, seorang anggota TNI Angkatan Darat. "Beliau yang terus memotivasi saya untuk mencoba Akabri. Tapi beliau juga bilang, jangan pakai jalan belakang. Harus lewat jalur resmi dan usaha sendiri," ujar Zainudin.

Ia mengikuti seleksi di seluruh matra—Angkatan Laut di Jakarta Utara, Angkatan Udara di Halim Perdanakusuma, Angkatan Darat di Kodam Siliwangi Bandung, dan Kepolisian di Tegalega. "Saya belajar sendiri, pindah-pindah tempat tinggal. Tidak ada yang ngajarin, semua saya pelajari dari buku dan pengalaman tes," jelasnya.

Berkat ketekunan dan tekad kuat, Brigjen Udin lulus seleksi secara murni dan bergabung dengan Akademi Kepolisian (Akp), dan resmi lulus pada tahun 1996 dengan pangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA).

Sambil menunggu hasil seleksi, ia sempat kuliah di Politeknik ITB Bandung selama tujuh bulan. Pada seleksi 1992–1993, ia berhasil masuk peringkat ke-14 di Kodam Siliwangi. "Awalnya saya sempat ragu, tapi akhirnya saya yakin polisi adalah jalan saya," katanya.

Penempatan pertamanya adalah di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana ia bertugas selama empat setengah tahun. Salah satu pengalaman dinas yang paling berkesan bagi Brigjen Pol. Udin Zainudin, S.I.K., M.H. terjadi pada tahun 1997, ketika beliau bertugas di Manggarai, Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada saat itu, istrinya sedang hamil tiga bulan setengah, dan mereka tinggal di asrama dinas. Situasi di wilayah tersebut sedang dalam kondisi tegang, dengan tingkat kerawanan yang tinggi.

Ketika ketegangan mulai meningkat, Wakapolres setempat memberi arahan agar para anggota menyelamatkan keluarga mereka terlebih dahulu. Brigjen Pol. Zainudin segera bergerak mencari istrinya. Dalam proses pencarian, beliau menemukan sebuah boks tempat berlindung yang dipenuhi darah dan sisa-sisa daging babi, kondisi yang sangat tidak layak untuk digunakan. Namun karena



keterbatasan tempat, para ibu—termasuk istri Wakapolres, Kabag, dan Kasat—tetap bertahan di sana dan bersama-sama membersihkan tempat itu agar bisa digunakan sementara.

Hanya dengan satu unit mobil dinas, Brigjen Udin membawa keluarganya bertahan di gudang senjata setelah situasi sedikit terkendali. Namun pada malam harinya, ia kembali mencari istrinya yang terpisah dari rombongan. Dalam kondisi tanpa komunikasi—karena telepon genggam belum umum saat itu—pencarian memakan waktu hampir empat jam, dari pukul 7 malam hingga 11 malam.

Yang membuat momen ini begitu menegangkan adalah karena istrinya sebelumnya pernah mengalami keguguran akibat keterbatasan fasilitas medis di lapangan. Kehamilan kali ini juga mengalami flek, bahkan sempat mengalami pendarahan hanya karena suara merpati yang hinggap di atap rumah. Karena pertimbangan keselamatan, istrinya akhirnya dibawa ke Bandung untuk menjalani perawatan kehamilan.

Pengalaman tersebut begitu membekas dalam hidupnya. Sebagai ungkapan syukur dan doa, anak pertama mereka diberi nama "Satria Jidan", yang berarti pejuang yang kuat bertahan hidup. Setelah kondisi di NTT kembali kondusif dan anaknya telah berusia satu bulan, sang istri kembali bergabung ke lokasi penugasan.

Ia juga dikirim ke Timor Timur selama delapan bulan, menangani dinamika keamanan. "Timor itu medan yang keras, tapi banyak pelajaran hidup yang saya dapat di sana," katanya. Pengalaman lain yang tak kalah membekas terjadi ketika

beliau masih berpangkat Letnan Dua dan ditugaskan dalam misi perdamaian di Timor Timur, sebelum menikah. Misi ini melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama berbagai elemen internasional seperti Palang Merah Internasional (ICRC).

Dalam misi tersebut, beliau bertugas sebagai Ketua Tim Verifikasi Kendaraan, baik kendaraan milik masyarakat lokal maupun kendaraan milik misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan kekuatan terbatas—17 personel yang terdiri dari 10 anggota Polda NTT dan 7 anggota lokal Timor—Brigjen Pol. Zainudin bertanggung jawab mengamankan kota serta mencegah pembakaran fasilitas dan aset pemerintah.

Dalam satu peristiwa di lapangan, Brigjen Pol. Zainudin sedang berupaya meleraikan konflik saat tiba-tiba merasakan bahaya dari belakang. Secara naluriah, beliau langsung menghindar—dan ternyata benar, sebuah golok panjang menembus darah kering nyaris mengenai tubuhnya. Salah satu anggota yang melihat kejadian itu segera memberi peringatan. Beliau meyakini bahwa saat itu dirinya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pengalaman ini mengajarkan Brigjen Pol. Zainudin arti kewaspadaan, keberanian, dan kepemimpinan yang tenang di tengah medan krisis. Dalam situasi seperti itu, nyawa bisa bergantung pada keputusan dalam sepersekian detik.

Usai dari Timor, beliau mendapat penugasan ke Dili, sebelum akhirnya kembali ditugaskan di Jawa Barat dan mengawali peran sebagai Kasat Lantas Polres Bogor hingga Majalengka.

Selama bertugas di Jawa Barat, Brigjen Pol. Zainudin menjalankan berbagai jabatan strategis selama kurang lebih delapan tahun. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan di PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) dan tidak lama setelah lulus, ia kembali ditugaskan di Jawa Barat. Kebijakan institusi saat itu memungkinkan anggota yang pernah bertugas di daerah konflik untuk diprioritaskan kembali ke kampung halaman. Brigjen Pol. Udin mengajukan permohonan tersebut, terlebih karena ia telah memiliki rumah tinggal di Bandung.

Kembali di Jawa Barat, ia menjabat sebagai Kapolresta Bogor selama dua tahun delapan bulan, kemudian berturut-turut sebagai Wakapolres Majalengka, Wakapolres Kota Bogor, dan Kapolresta Subang. Setelah itu, beliau mengikuti pendidikan lanjutan di Sespim selama tujuh bulan.

Penugasan berikutnya mengantarkan beliau ke Polda Kepulauan Bangka Belitung, dengan jabatan sebagai Kabagdalpers, kemudian Kasat PJR, dan selanjutnya sebagai Kapolres Bangka Selatan. Setelah menjabat sebagai Kabagbinopsnal Ditlantast Polda Babel selama dua tahun, beliau kembali mengikuti pendidikan di Sespimti sebagai bagian dari proses pembinaan karier kepemimpinan tingkat tinggi.

Pada bulan Maret 2020, Brigjen Pol. Udin Zainudin kembali dipercaya menempati posisi penting Kasubdit Jian Geo Dan Wasantara Ditjian Hankam Dan Geografi Debidjiantrat Lemhannas. Selama lebih dari tiga tahun, beliau aktif menjalankan tugas-tugas strategis kelembagaan, serta

sempat mengikuti pendidikan lanjutan selama enam bulan. Usai pendidikan tersebut, beliau diamanahi jabatan sebagai pejabat muda di bidang kependudukan, yang menjadi bagian dari perjalanan pengabdianya menjelang penugasan sebagai Inspektur Lemhannas RI.

Jika ditanya apa yang menjadi pegangan hidup Brigjen Pol. Udin Zainudin, S.I.K., M.H., maka jawabannya adalah: hidup itu seperti air yang mengalir. Dalam setiap perjalanan hidup, pasti ada kerikil dan batu yang menghadang. Namun baginya, rintangan tersebut tidak perlu dihadapi dengan kekerasan—cukup dihadapi dengan tenang dan perlahan disingkirkan. Selama seseorang menjaga etika, saling menghormati, dan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain, maka hidup akan terasa lebih lapang, ringan, dan bermakna.

Brigjen Udin tidak pernah memosisikan diri sebagai sosok yang harus menggurui. Dalam setiap kesempatan memberi arahan, baik dalam rapat maupun forum resmi, beliau selalu memulai dengan pernyataan yang merendahkan hati:

"Kalau ada manfaat dari apa yang saya sampaikan, anggaplah itu rahmat dari Allah. Tapi jika ada yang kurang berkenan, itu kekurangan saya pribadi yang belum mampu mengendalikan emosi."

Bagi Brigjen Pol Zainudin integritas dan karakter pribadi adalah fondasi utama dalam hidup dan karier. Tanpa karakter yang kuat dan kejujuran yang utuh, kepercayaan tidak akan pernah terbentuk. Justru dari karakter itulah muncul nilai-nilai luhur seperti tanggung jawab, kejujuran, etos kerja, dan sikap patriotik—nilai-nilai

yang kemudian membentuk kredibilitas dan reputasi seseorang di mata kolega, bawahan, maupun masyarakat luas.

Dalam kiprahnya sebagai Inspektur di Lemhannas RI, Brigjen Pol. Udin Zainudin, S.I.K., M.H. dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam menjaga harmonisasi antarunit dan koordinasi lintas kelembagaan. Salah satu ujian terberat datang saat proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana akurasi data, keselarasan arah kebijakan, dan soliditas tim sangat diuji.

"Yang paling sulit bukan sekadar menyusun laporan, tapi menyatukan pemahaman seluruh lini—dari pejabat pembuat komitmen sampai staf teknis," ungkapnya. Untuk itu, ia mengedepankan prinsip komunikasi terbuka dan kolaborasi sinergis. Pendekatan ini terbukti berhasil: audit selama sebulan, termasuk tahap on-the-spot selama sepuluh hari, berjalan lancar dan lembaga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Baginya, WTP bukan sekadar simbol administratif, tetapi cerminan integritas, dedikasi, dan kerja sama yang kuat. "Kalau bisa bertahan WTP sepuluh tahun berturut-turut, itu jadi modal besar untuk memperkuat posisi kelembagaan," jelasnya. Ia percaya bahwa koordinasi yang efektif jauh lebih strategis daripada sekadar mengejar kesempurnaan dokumen.

Lebih dari sekadar manajemen struktural, Brigjen Pol. Zainudin memberi perhatian serius pada pembentukan karakter aparatur. Ia menekankan pentingnya kesederhanaan, menjauhi gaya hidup hedonis, dan menjunjung tinggi nilai pengabdian. "Kesederhanaan itu bukan soal penampilan, tapi soal integritas. Dari situlah lahir penghormatan yang tulus," tegasnya.

Dalam kepemimpinan, ia menolak budaya hierarki kaku. Ia menghargai perbedaan gaya kerja antarindividu dan lebih memilih membina melalui keteladanan dan keterbukaan. "Saya tidak menuntut semua orang sama. Yang penting, jujur, mau belajar, dan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain," tuturnya.

Ia juga menaruh perhatian pada pentingnya pendidikan karakter di berbagai lembaga tinggi seperti Sesko TNI dan Sespimti. Ia mengapresiasi bahwa banyak metode pelatihan yang sederhana namun efektif. "Yang penting bukan besarnya anggaran, tapi komitmen. Pembinaan itu bisa murah meriah, tapi dampaknya besar kalau dijalankan dengan hati," tutupnya.



Sundari: ASN Harus Terus Beradaptasi dengan Perubahan

Menjadi salah satu staf TU Deputy Bidang Pendidikan selama kurang lebih 14 tahun membuat Sundari terbiasa berhadapan dengan berbagai karakter pimpinan. Baginya, karakter pimpinan yang berbeda mendorongnya untuk selalu belajar menyesuaikan diri. "Dengan karakter (pimpinan) yang berbeda-beda tentu saja saya menyesuaikan, tapi secara kedinasan itu sudah biasa," tuturnya.

Dirinya bercerita bahwa saat awal menjadi Calon PNS (CASN) di Lemhanans RI di tahun 1988, ia ditugaskan menjadi salah satu staf TU Direktur Pendidikan yang saat itu berada di bawah Kesettamaan. Di situ, ia ditempa untuk belajar terkait persuratan. "Ternyata sampai di situ saya disuruh ngetik surat. Keringet dingin. Belajar dan sampe sore karena belum benar suratnya apalagi saat itu pakai mesin ketik. Jadi diulang lagi saya sampe gak berani pulang. Saat itu saya yang paling junior dari empat staf," kenangnya sembari tertawa kecil.

Di tahun 1989, Sundari mengikuti Diklat Prajabatan di

LAN RI dan kemudian diangkat menjadi ASN di Tahun yang sama. Ia kemudian dipindahkan menjadi staf kepala bagian di bawah Direktur Pendidikan pada saat itu hingga tahun 2006 sebelum akhirnya dipindah menjadi staf TU Deputy Bidang Pendidikan.

Sebagai Kasubbag TU Deputy Bidang Pendidikan saat ini, Sundari tidak hanya bertugas dalam administrasi persuratan dan arsip namun juga sesekali menyiapkan keperluan pimpinan di Deputy Bidang Pendidikan. Hal tersebut juga terkadang membuat dirinya harus pulang lebih larut. Namun, Sundari menyadari bahwa itu merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai ASN yang merupakan cita-citanya sejak duduk di bangku SMEA (SMA).

“Dari kecil, saya itu dari mulai SMA udah berpikiran ingin menjadi pegawai negeri. Sudah ada di dalam hati saya ingin menjadi pegawai negeri,” tuturnya sembari tersenyum mengingat saat itu.

Keinginannya menjadi pegawai negeri berawal saat dirinya menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama di Boyolali dan melanjutkan sekolah di Jakarta. Di Jakarta, Sundari tinggal bersama dengan paman dan bibinya yang berprofesi sebagai ASN guru. Terinspirasi dari kedisiplinan keluarga paman dan bibinya, Sundari menatapkan keinginannya untuk menjadi seorang ASN Guru saat itu.

Berasal dari keluarga petani sederhana, kedua orang tuanya saat itu sempat meragukan keinginan Sundari untuk menjadi seorang ASN. Namun dirinya yakin dapat menggapai cita-citanya tersebut. “Orang tua awalnya meragukan apakah bisa jadi ASN karena kamu kan orang dari kampung. Saya yakin bisa jadi ASN, pasti bisa. Kalau kita terus semangat pasti nanti bisa,” jelasnya.

Namun takdir berkata lain, saat ingin mendaftar Sekolah Pendidikan Guru, dirinya kurang beruntung karena saat itu pendaftaran telah ditutup. Dengan

tekat yang kuat untuk tetap menjadi seorang ASN, Sundari pun memutuskan untuk melanjutkan Sekolah Pendidikan menengah ke SMEA Yapsa dengan jurusan tata buku.

Setelah menyelesaikan pendidikan di SMEA, Sundari sempat bekerja di sebuah pabrik selama kurang lebih satu tahun sebelum ia mendapatkan informasi pembukaan pendaftaran Calon PNS (CASN) Lemhannas RI dari salah seorang tetangga paman dan bibinya yang juga seorang ASN di Lemhannas RI. Dengan yakin dan semangat, Sundari kemudian mengumpulkan seluruh berkas yang dibutuhkan dan mengikuti seleksi CASN Lemhannas RI. Bersyukur, dia menjadi salah satu peserta yang lolos tes dan diterima bekerja di Lemhannas RI.

“Alhamdulillah terus saya disuruh ikut tes. Tesnya di LAN. Ternyata saya lolos. Iya saya langsung jadi CPNS organik di Lemhannas RI,” ceritanya.

Banyak hal menarik yang Sundari lalui selama 37 tahun menjadi ASN, salah satunya yaitu saat dirinya harus bekerja di tengah pandemi COVID-19. Saat itu, Sundari diharuskan memakai masker, face shield, hingga sarung tangan saat mengajukan dokumen ke dalam ruangan Deputy Pendidikan saat itu, Mayjen TNI Rahmat Pribadi. Selain itu, ia juga diharuskan mensterilkan seluruh dokumen persuratan cetak dengan setrika.

Kejadian yang berkesan saat itu adalah ketika dirinya tidak sengaja lupa melapisi dokumen yang akan disetrika dengan selembar kain dan menyebabkan dokumen tersebut hangus.

“Waktu zaman corona kemari, Pak Mayjen TNI Rahmat Pribadi (Deputy Pendidikan saat itu) untuk surat-surat yang masuk, terus terang harus disteril dan cara sterilnya itu harus digosok (disetrika). Jadi semua surat dilapisi kain dan saya gosok. Kebetulan saya waktu itu lupa ada kwitansi yang saya setrika tanpa saya lapisi kain sehingga kertasnya hangus jadi habislah itu. Untungnya pihak pengirim

masih punya copy-an sehingga saya tidak dimarahi,” ujarnya sambil tertawa mengingat kejadian tersebut.

ASN yang pernah dua kali mendapatkan gelar ASN terbaik di Lemhannas RI tahun 2005 dan 2006 ini menuturkan bahwa sebagai ASN senior, ia harus terus mengikut perkembangan teknologi dalam melakukan pekerjaan. Hal itu juga didukung oleh pimpinan mengingat hal tersebut akan memudahkan dalam koordinasi dan penyelesaian pekerjaan.

“Saya juga berusaha untuk bisa mengikuti perubahan-perubahan untuk ke depannya seperti srikandi sekarang ini,” ujarnya.

Deputy Pendidikan saat itu Marsda TNI Andi Heru, lanjut Sundari, mengatakan bahwa TU pimpinan harus bisa mengklasifikasikan jenis-jenis surat dengan aplikasi Srikandi dan harus segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti tanpa tatap muka. “Beliau selalu mendidik saya terkait hal tersebut dan malahan beliau yang lebih tahu hal tersebut, diberikan motivasi juga oleh beliau,” kenangnya.

Ibu dari tiga anak perempuan yang akan memasuki masa purna tugas di tahun 2026 ini berharap Deputy Bidang Pendidikan Tingkat Nasional dapat terus meningkatkan kualitas program pendidikannya di masa mendatang dengan terus memperbarui kurikulum sesuai dengan situasi yang dihadapi bangsa saat ini agar dapat terus aktif mencetak kader-kader pimpinan nasional yang memiliki pola pikir holistik, integral dan menyeluruh dalam mengikuti perkembangan tantangan dinamika global.

Sundari juga berharap agar Lemhannas RI meningkatkan kapasitas para personel muda Lemhannas RI agar dapat terus membangun Lemhannas RI yang visioner di masa mendatang. “ASN-ASN yang baru kan lebih berkompeten lagi. ASN baru sekarang punya inisiatif perubahan yang sangat baik dan tidak ada salahnya pimpinan mewadahi para staf yang memiliki pemikiran inovatif,” pungkasnya di akhir wawancara.



Paus Fransiskus Meninggal Dunia, Gereja Katolik Menuju Masa Depan di Bawah Paus Leo XIV

Foto. Berbagai sumber



Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik Roma ke-266, wafat pada 21 April 2025 dalam usia 88 tahun. Vatikan mengonfirmasi bahwa ia meninggal dunia dengan tenang akibat stroke dan henti jantung sehari setelah tampil di hadapan publik untuk terakhir kalinya dalam Misa Minggu Paskah di Lapangan Santo Petrus. Wafatnya Paus Fransiskus disambut duka mendalam oleh umat Katolik di seluruh dunia dan menandai akhir dari sebuah kepausan yang dikenal penuh kerendahan hati, reformasi, dan welas asih.

Lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio di Buenos Aires, Argentina, Paus Fransiskus mencetak sejarah pada tahun 2013 sebagai Paus pertama dari Jesuit, yang pertama dari benua Amerika, serta Paus non-Eropa pertama dalam lebih dari seribu tahun. Sejak awal masa jabatannya, ia dikenal sebagai sosok yang sederhana dan membumi. Ia memilih tinggal di wisma tamu Vatikan daripada di Istana Apostolik dan menetapkan prioritas pastoral yang berfokus pada kaum miskin, kaum terpinggirkan, dan isu lingkungan. Ensiklik terkenalnya *Laudato Si'* menyerukan tindakan segera terhadap perubahan iklim, sementara upayanya membangun dialog antaragama dan memperluas partisipasi dalam kehidupan Gereja menunjukkan komitmennya pada inklusivitas.

Kebijakan dan pendekatannya kerap menuai kritik dari kalangan konservatif, namun Paus Fransiskus tetap teguh pada keyakinannya bahwa Gereja harus menjadi tempat yang ramah dan penuh belas kasih. Ia melakukan reformasi terhadap struktur administrasi Kuria Vatikan, meningkatkan transparansi dalam kasus pelecehan seksual oleh klerus, serta memperluas peran umat awam dalam proses pengambilan keputusan. Di tengah masalah

kesehatan yang terus memburuk—mulai dari operasi usus besar pada 2021 hingga masalah ginjal—Paus Fransiskus tetap aktif menjalankan tugasnya hingga akhir hayat.

Setelah wafatnya, Vatikan menetapkan masa berkabung selama sembilan hari, dikenal sebagai *novemdiales*. Jenazah Paus Fransiskus disemayamkan di Basilika Santo Petrus, tempat ribuan peziarah dari seluruh dunia datang memberikan penghormatan terakhir. Misa pemakaman diselenggarakan pada 26 April dan dihadiri oleh berbagai pemimpin dunia, tokoh agama, serta umat beriman dari berbagai negara, sebagai penghormatan atas warisan iman dan kepemimpinannya.

Dengan posisinya yang kosong, para Kardinal Gereja Katolik berkumpul dalam konklaf pada 7 Mei. Dalam tradisi yang berlangsung di Kapel Sistina, para Kardinal berdoa dan melakukan pemungutan suara selama beberapa putaran. Pada 8 Mei, asap putih mengepul dari cerobong kapel, menandakan bahwa seorang Paus baru telah terpilih. Kardinal Robert Francis Prevost, seorang prelatus kelahiran Amerika Serikat yang menjabat sebagai Prefek Dikastri untuk Para Uskup, terpilih sebagai Paus ke-267. Ia memilih nama kepausan Leo XIV.

Paus Leo XIV, yang berusia 69 tahun, dikenal akan latar belakang misinya dan pengalaman kepemimpinannya di Peru serta Vatikan. Pemilihannya disambut secara luas sebagai pilihan yang membawa kesinambungan dan persatuan—jembatan antara reformasi Paus Fransiskus dan kebutuhan akan kepemimpinan administratif yang kuat untuk menghadapi tantangan zaman. Fasih dalam bahasa Spanyol, Inggris, dan Italia, Paus Leo XIV dinilai memiliki kepekaan pastoral dan pemahaman global yang mendalam.

Dalam penampilan publik pertamanya dari balkon Basilika Santo Petrus, Paus Leo XIV menyampaikan pesan perdamaian dan solidaritas. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Paus Fransiskus atas warisan pelayanannya, dan mengajak seluruh umat Katolik untuk tetap bersatu dalam doa, kasih, dan harapan. "Gereja adalah rumah bagi semua orang," ujarnya, "dan di tengah ketidakpastian zaman ini, kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih dan belas kasih."

Ucapan selamat segera datang dari berbagai penjuru dunia. Para pemimpin agama dan politik menyampaikan apresiasi mereka atas pemilihan Paus yang baru, termasuk dari Patriark Konstantinopel, Uskup Agung Canterbury, dan sejumlah kepala negara. Presiden Rusia Vladimir Putin, salah satunya, menyatakan harapan agar "dialog konstruktif" antara Rusia dan Tahta Suci dapat terus terjalin.

Kini, Paus Leo XIV memulai tugasnya memimpin Gereja yang telah sangat dipengaruhi oleh visi pendahulunya. Tantangan besar menantinya yaitu memulihkan kepercayaan internal Gereja, memperdalam kerja sama antar agama, merespons ketidaksetaraan sosial, dan melanjutkan pemulihan dari luka-luka masa lalu. Namun dengan pengalaman dan visinya, banyak pihak percaya bahwa beliau mampu membangun masa depan Gereja yang kokoh dan penuh harapan.

Kenangan akan Paus Fransiskus—akan kesederhanaannya, kepeduliannya terhadap sesama, dan komitmennya pada Injil—akan tetap hidup dalam hati umat Katolik. Sementara itu, di bawah kepemimpinan Paus Leo XIV, Gereja Katolik memasuki babak baru, dengan semangat yang diperbarui untuk melanjutkan misi cinta, keadilan, dan pengharapan bagi seluruh umat manusia.

Sumber. Berbagai Sumber

Indonesia Resmikan Proyek Baterai Kendaraan Listrik Terbesar di Asia Tenggara

Pada Minggu, 29 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Artha Industrial Hills (AIH), Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Proyek ini, yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), diperkirakan akan menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Dengan nilai investasi mencapai USD 5,9 miliar, proyek ini mencakup area seluas 3.023 hektare dan diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia serta menguatkan posisi negara dalam sektor energi ramah lingkungan.

Presiden Prabowo menekankan bahwa pembangunan ekosistem ini adalah bukti keseriusan Indonesia dalam mewujudkan transisi energi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Menurutnya, proyek ini bukan hanya langkah konkret dalam pengembangan energi terbarukan, tetapi juga sebuah bagian dari cita-cita panjang Indonesia untuk mendorong hilirisasi industri. Hilirisasi, menurut Presiden, bukanlah konsep baru, melainkan merupakan amanat dari sejarah bangsa, yang dimulai sejak zaman Presiden Soekarno.

Lebih lanjut, Presiden menyatakan bahwa hilirisasi akan menjadi salah satu pilar utama dalam

mewujudkan swasembada energi di Indonesia. "Saya diberitahu oleh para pakar bahwa bangsa kita ini sungguh-sungguh bisa swasembada energi dan hitungan saya tidak lama, tidak lama. Lima tahun paling lambat enam tahun, tujuh (tahun) kita bisa swasembada energi," ujar Prabowo dalam sambutannya. Salah satu kunci untuk mencapai swasembada tersebut adalah pengembangan teknologi energi surya yang akan didukung oleh industri baterai nasional.

Proyek ini tidak hanya tentang pembuatan baterai kendaraan listrik, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem yang terintegrasi, mulai dari pengolahan mineral strategis hingga produksi baterai dan kendaraan listrik. Dengan demikian, Indonesia akan semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan energi terbarukan, sekaligus membuka peluang besar bagi investasi global.

Salah satu poin yang disorot oleh Presiden Prabowo adalah pentingnya kerja sama internasional dalam mencapai tujuan ini. "Kita bermitra dengan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari Tiongkok. Kita bisa bekerja sama dengan program yang menurut saya ini termasuk bisa dikatakan kolosal, bisa dikatakan terobosan luar biasa. Dari sini kita bisa menghasilkan energi terbarukan dan ramah lingkungan yang dicita-citakan seluruh dunia," tambah Presiden. Menurutnya, kerjasama internasional ini menjadi contoh

yang baik di tengah ketegangan geopolitik yang tengah melanda dunia, di mana Indonesia berhasil menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan sambil mendorong kemakmuran bersama.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, turut memberikan penekanan pada pentingnya kesetaraan dalam hilirisasi. Ia menegaskan bahwa proyek ini tidak hanya akan menguntungkan pemerintah pusat atau investor, tetapi juga melibatkan masyarakat lokal. "Jangan pengusaha Jakarta yang ada di daerah, tetapi pengusaha daerah yang ada di daerah. Agar apa? Jadikan anak-anak daerah menjadi tuan di negerinya sendiri," ujar Bahlil. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa proyek besar ini membawa manfaat langsung kepada masyarakat sekitar, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan ekonomi lokal.

Proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik ini juga diprediksi akan menyerap hingga 8.000 tenaga kerja langsung dan 35.000 pekerja tidak langsung. Dengan kemitraan antara ANTAM, IBC, dan CBL, proyek ini juga berpotensi menjadi motor penggerak utama dalam pengembangan teknologi dan industri kendaraan listrik di Indonesia.

Sumber: Berbagai Sumber





kompas.com/Anggara Wikan Prasetya

Foto: muncak.id

Rinjani

Dunia yang menyimpan Keajaiban

Gunung Rinjani, dengan ketinggiannya yang mencapai 3.726 meter, bukan hanya terkenal sebagai destinasi pendakian favorit, tapi juga menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, gunung ini adalah rumah bagi berbagai macam flora dan fauna, banyak di antaranya langka dan hanya bisa ditemukan di kawasan ini. Namun, keindahan Gunung Rinjani tak hanya terlihat dari pemandangannya, melainkan juga dari ekosistem yang tumbuh di sana.

Di sepanjang jalur pendakian, pendaki akan melewati berbagai tipe vegetasi, mulai dari hutan tropis yang lebat hingga sabana alpine di ketinggian lebih dari 2.000 meter. Salah satu tumbuhan ikonik yang mudah ditemukan adalah edelweiss, bunga yang tumbuh di daerah dataran tinggi dan sering menjadi simbol gunung-gunung di Indonesia. Di sekitar danau Segara Anak, kawasan kawah yang menjadi salah satu daya tarik utama, Anda bisa menemukan anggrek hutan yang jarang terlihat di tempat lain. Tak hanya itu, pohon-pohon besar seperti pinus dan beberapa jenis bambu juga menghiasi kaki gunung, memberikan kesejukan dan keteduhan.

Selain vegetasi, fauna yang hidup di Rinjani juga tak kalah menarik. Di hutan-hutan sekitar gunung, ada populasi rusa yang sering terlihat sedang mencari makan di antara pepohonan. Rusa ini merupakan salah satu satwa endemik yang hanya dapat ditemukan di wilayah

Lombok dan sekitarnya. Tak jarang, di kawasan yang lebih rendah, pendaki bisa melihat jejak-jejak babi hutan atau monyet ekor panjang yang melompat-lompat dari dahan ke dahan. Burung elang jawa, yang merupakan spesies yang terancam punah, juga kerap melintas di langit Rinjani, menambah keragaman hayati kawasan ini.

Namun, yang membuat Rinjani benar-benar menarik adalah keseimbangan alam yang ada di sana. Kawasan ini tidak hanya menjadi tempat hidup berbagai spesies, tetapi juga berfungsi sebagai tempat penampungan air bagi kawasan sekitarnya. Danau Segara Anak, misalnya, tidak hanya menawarkan pemandangan yang menakjubkan, tetapi juga menjadi sumber air bagi masyarakat Lombok. Selain itu, Gunung Baru Jari, sebuah gunung kecil yang tumbuh di dalam kawah, menambah kompleksitas geologis di kawasan ini. Aktivitas vulkanik dari gunung ini sering kali melepaskan uap dan asap, menandakan bahwa kehidupan di sekitar Rinjani terus bergerak, meski di bawah permukaan.

Gunung Rinjani juga menjadi contoh bagaimana alam dan manusia dapat hidup berdampingan. Masyarakat sekitar, khususnya suku Sasak, telah lama menjalani kehidupan yang sangat bergantung pada keberadaan gunung ini. Selain menjadi sumber air dan kekayaan alam, Rinjani juga memiliki nilai spiritual yang tinggi bagi penduduk setempat. Mereka percaya bahwa gunung ini memiliki kekuatan magis

dan sering mengadakan ritual atau upacara sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Dalam perjalanan menuju puncak, pendaki tidak hanya disuguhkan pemandangan alam yang luar biasa, tetapi juga dapat merasakan suasana yang kental dengan budaya lokal.

Gunung Rinjani bukanlah tempat yang mudah dijangkau. Pendakian menuju puncaknya cukup menantang, dengan medan yang terjal dan cuaca yang tak bisa diprediksi. Namun, bagi mereka yang berhasil mencapai puncak atau bahkan hanya sekadar menikmati pemandangan dari jalur-jalur pendakian, pengalaman ini terasa sangat memuaskan. Di puncaknya, Anda bisa melihat panorama kawah yang luas, serta pemandangan Danau Segara Anak yang terhampar di bawah.

Keindahan Gunung Rinjani bukan hanya terletak pada pemandangan atau tantangan pendakian. Ia adalah sebuah ekosistem yang utuh, dengan flora, fauna, dan budaya yang saling berhubungan. Rinjani memberikan pelajaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam, di mana kehidupan manusia, satwa, dan tumbuhan dapat berkembang bersama-sama dalam satu ruang yang saling bergantung. Ini adalah bukti bahwa alam, meski kadang tampak keras dan tak terjangkau, sebenarnya memiliki sistem yang sangat rapuh dan membutuhkan perhatian serta perlindungan.

Sumber: Berbagai Sumber

Di tengah belantara hutan hujan tropis Indonesia, tersembunyi sebuah keajaiban botani yang kerap disebut "Anggrek Hantu". Julukan ini bukan tanpa alasan. Berbeda dari anggrek kebanyakan yang memamerkan daun dan batangnya, spesies-spesies anggrek ini seringkali tidak memiliki daun yang jelas, bunganya muncul secara misterius, dan keberadaannya begitu samar sehingga seolah-olah "menghilang" di antara pepohonan. Keunikan inilah yang membuat para peneliti dan pecinta anggrek terobsesi untuk menyingkap rahasia mereka.

Anggrek Hantu dikenal dengan beberapa ciri khas yang membuatnya istimewa. Sebagian besar spesies anggrek ini, terutama dari genus *Taeniophyllum* dan *Chiloschista*, serta *Gastrodia*, memiliki daun yang sangat kecil seperti sisik atau bahkan tidak memiliki daun sama sekali. Proses fotosintesis utama mereka dilakukan oleh akar-akar hijau yang menyerupai kawat dan melekat erat pada batang pohon inang, memberikan kesan "melayang" di udara.

Salah satu alasan utama julukan "hantu" adalah sifat berbunga yang sporadis dan sulit diprediksi. Beberapa jenis hanya mekar setahun sekali selama beberapa minggu, bahkan ada yang tidak berbunga sama sekali dalam setahun. Ini membuat pertemuan dengan bunga anggrek hantu di alam liar menjadi sebuah keberuntungan langka.

Meskipun seringkali tidak mencolok secara keseluruhan, bunga anggrek hantu memiliki keindahan tersendiri. Warnanya bervariasi, mulai dari putih transparan, kekuningan, hingga kecoklatan, dengan bentuk kelopak yang unik, kadang menyerupai tanduk atau lonceng kecil. Misalnya, *Gastrodia bambu* dikenal memiliki bunga seperti lonceng yang tidak terbuka lebar dan bisa menyebarkan bau seperti ikan busuk untuk menarik penyerbuk tertentu.

Kehidupan anggrek hantu juga sangat bergantung pada simbiosis dengan jamur mikoriza untuk mendapatkan nutrisi, sebuah fenomena yang dikenal sebagai holomikotropik atau mikro heterotrofik. Ketergantungan ini membuat mereka sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan; tanpa jamur inang yang tepat, mereka tidak dapat bertahan hidup.

Indonesia adalah rumah bagi beberapa spesies anggrek hantu, dan upaya eksplorasi terus mengungkap keberadaan mereka. Salah satu yang menarik adalah *Gastrodia bambu*, yang pertama kali ditemukan di Yogyakarta pada akhir 2016 di Gunung Merapi. Meskipun sempat dianggap endemik Jawa, penelitian lebih lanjut mengungkap bahwa anggrek ini juga ditemukan di Vietnam. Berbagai spesies dari genus *Taeniophyllum*, seperti *Taeniophyllum conoceras* Schltr., juga termasuk anggrek hantu karena karakteristik tanpa daunnya. Spesies ini sempat "menghilang" selama 105 tahun sebelum ditemukan kembali

di Papua Barat dan bahkan menjadi maskot Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 2024. Ada pula *Taeniophyllum pusillum* yang ditemukan tumbuh di hutan karst, menunjukkan ketahanan luar biasa di lingkungan yang sulit. Pengumuman Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Februari 2025 mengenai penemuan 50 taksa flora baru sepanjang 2024 juga sangat mungkin mencakup spesies anggrek hantu atau jenis anggrek misterius lainnya yang baru dideskripsikan, terus memperkaya daftar kekayaan flora tersembunyi di Indonesia.

Meskipun memukau, anggrek hantu adalah salah satu kelompok tumbuhan yang paling terancam. Kondisi ekologi yang sangat spesifik, ketergantungan pada jamur mikoriza, dan laju pertumbuhan yang lambat membuat mereka sangat rentan. Ancaman utama meliputi kerusakan habitat akibat deforestasi, alih fungsi lahan, dan kebakaran hutan yang menghancurkan lingkungan mikro mereka.

Konservasi anggrek hantu membutuhkan upaya multi-pihak, mulai dari perlindungan habitat alami yang ketat, pengembangan teknik budidaya *ex-situ* (di luar habitat aslinya), hingga peningkatan kesadaran masyarakat. Setiap penemuan "anggrek hantu" adalah pengingat bahwa alam Indonesia masih menyimpan banyak keajaiban yang harus kita jaga, agar pesona misterius mereka tidak benar-benar menghilang dan dapat terus memukau generasi mendatang.

Sumber: Berbagai Sumber

Anggrek Hantu

Permata Gaib dari Rimba Nusantara

Foto. Antaranews.com

Membangun Ketahanan Bangsa Melalui Pendidikan P4N: Perspektif Kombes Pol Budiman Bostang Panjaitan S.H., S.I.K., M.H.

Sebagai peserta Pendidikan P4N LXVIII Lemhannas RI, Kombes Pol Budiman Bostang Panjaitan, S.H., S.I.K., M.H. menegaskan bahwa program ini merupakan salah satu agenda strategis dalam mencetak kader pimpinan nasional yang tangguh. Ia menyatakan, “Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) dirancang untuk membentuk pemimpin berwawasan kebangsaan, berintegritas tinggi, serta mampu berpikir secara komprehensif, inklusif, integral, dan holistik,” ungkap pria yang saat ini menjabat Analis Kebijakan Inspektorat Pengawasan Umum Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ia menambahkan bahwa program ini bukan hanya untuk memperkuat kapasitas individu, tetapi juga memiliki kontribusi penting dalam membangun ketahanan nasional. “Penguatan kepemimpinan di sektor pemerintahan, TNI/Polri, dan masyarakat sipil merupakan pondasi utama dalam menciptakan stabilitas nasional,” ujar Bostang. Menurutnya, pendekatan multidimensi yang diterapkan menjadi kunci utama dalam menyiapkan pemimpin yang adaptif dan visioner dalam menghadapi dinamika global.

Bostang juga membagikan kesan awalnya mengikuti program ini sebagai sesuatu yang membanggakan. “Saya merasakan kebanggaan dan antusiasme sejak hari pertama mengikuti P4N. Program ini sangat berbeda—eksklusif, sarat nilai kebangsaan, dan atmosfer intelektualnya begitu kuat,” tuturnya. Interaksi lintas sektor dengan peserta dari berbagai latar belakang memperluas pandangannya terhadap tantangan kepemimpinan nasional.

Namun demikian, ia juga mencermati adanya tantangan, khususnya dalam penyesuaian terhadap intensitas materi dan pola pikir komprehensif yang dituntut selama program. “Adaptasi terhadap materi yang padat dan heterogenitas peserta menjadi tantangan tersendiri, tetapi justru di situlah kapasitas saya sebagai calon pemimpin nasional diuji dan ditempa,” ungkapnya yang merupakan Ketua Senat P4N Angkatan 68 Lemhannas RI berdasarkan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 26 tahun 2025. Ia menilai bahwa pengalaman ini tidak hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga membentuk pola pikir kepemimpinan yang lebih tangguh dan berorientasi solusi.

Lebih lanjut, Bostang menilai bahwa materi dan metode pembelajaran yang disajikan

dalam P4N sangat relevan dengan kebutuhan kepemimpinan saat ini. “Kurikulum P4N tidak hanya bicara soal geopolitik dan kebangsaan, tetapi juga menyentuh isu-isu seperti transformasi digital, ketahanan nasional, dan ancaman non-tradisional,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya metode yang digunakan, seperti kuliah umum, diskusi kelompok, dan studi kasus. “Kuliah umum memperkuat wawasan teoritis, diskusi kelompok melatih keterampilan kolaborasi dan negosiasi, dan studi kasus mengasah kemampuan analitis peserta dalam menghadapi persoalan riil,” katanya. Bagi Bostang, studi kasus menjadi komponen penting karena “metode ini membuat peserta tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengaplikasikannya secara nyata.”

Terkait materi kepemimpinan, ia menyampaikan bahwa P4N memberikan penekanan pada visi jangka panjang dan nilai-nilai kebangsaan. “Pemimpin tidak cukup hanya memiliki kekuasaan, tetapi harus mampu merancang arah pembangunan nasional dengan integritas dan keberpihakan terhadap seluruh lapisan masyarakat,” ujar Bostang. Ia merasa pengalaman belajar di program ini telah memperdalam pemahamannya tentang bagaimana menerapkan teori kepemimpinan dalam konteks aktual.

Dalam pandangannya, kualitas narasumber dan tutor dalam program ini juga sangat berperan. “Para pengajar di P4N adalah ahli di bidangnya, dan interaksi langsung dengan mereka sangat memperluas wawasan saya,” ungkapnya. Ia juga menilai dinamika kelas yang tercipta

karena keberagaman peserta sebagai kekuatan tersendiri. “Diskusi antarsektor—antara pemerintah, TNI/Polri, akademisi, dan dunia usaha—memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang tantangan bangsa,” tambahnya.

Menurutnya, P4N memiliki peran krusial dalam menyiapkan pemimpin yang mampu berpikir strategis, mengambil keputusan tepat, dan siap menghadapi tantangan global. “Kombinasi antara teori, praktik, dan nilai kebangsaan dalam program ini adalah formula yang sangat efektif dalam membentuk pemimpin masa depan,” tegasnya.

Sebagai catatan penutup, Bostang menyarankan peningkatan pada aspek pembelajaran berbasis tantangan aktual. “Studi kasus dan simulasi tentang isu-isu seperti perubahan iklim, pandemi, atau geostrategi global perlu diperbanyak. Ini akan melatih peserta menjadi pemimpin yang adaptif dan siap menghadapi ketidakpastian,” ujarnya.





Gerina

Gerakan Indonesia Menanam

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) yang merupakan gerakan nasional untuk mendorong masyarakat untuk menanam dan membangun ketahanan pangan

Program inovatif Gerina:

Si Opung

Solusi olah padi terapung

- Teknologi bercocok tanam padi di atas kolam air
- Inovatif untuk daerah dengan lahan terbatas atau tergenang
- Menjadikan air sebagai lahan produktif

Si Cepot

Solusi cepat panen via pot

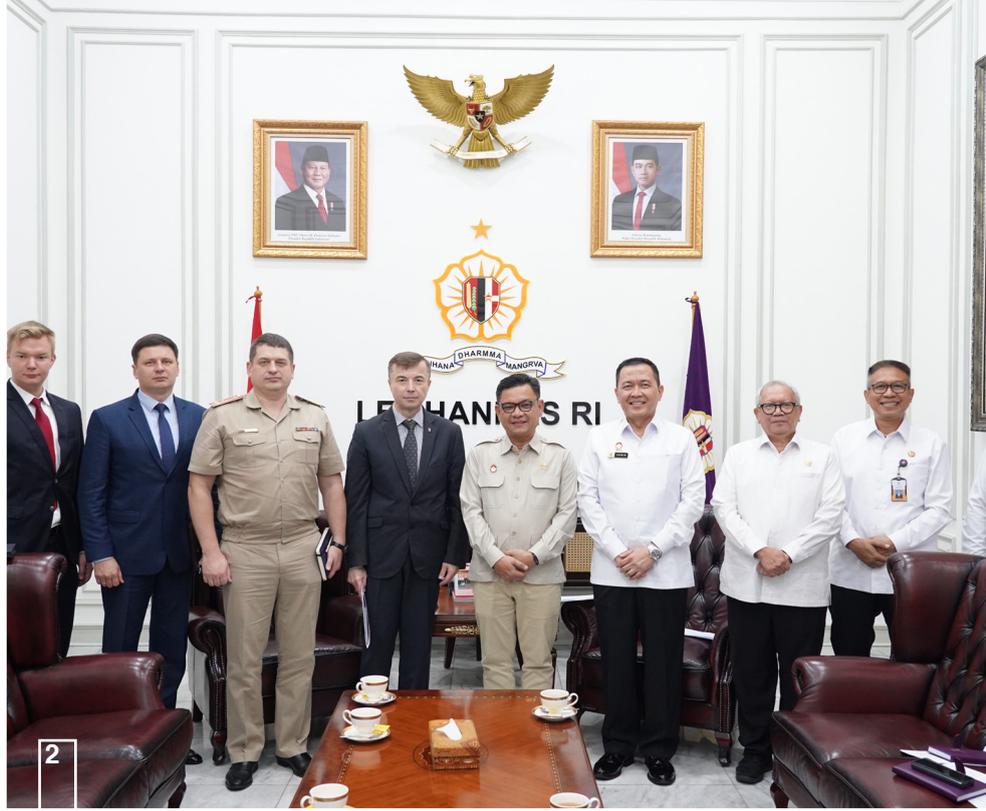
- Menanam padi sawah dan tanaman pangan lainnya di media pot
- bisa digunakan di rumah tangga, sekolah, hingga lingkungan urban
- cocok untuk cabai, kentang dan sayuran lainnya

Sumber: Indonesiabaik.id





1



2

- 1 Forum Komunikasi Ketahanan Nasional bertempat di Ruang Kresna, Lemhannas RI, pada Selasa, (29/04)
- 2 Kunjungan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Y.M. Sergei Tolchenov bertempat di Ruang Tamu Gubernur Lemhannas RI pada Kamis (17/04)
- 3 Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily berkesempatan menjadi narasumber dalam Penguatan Kapasitas Kepemimpinan Menuju Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara – Jatim Retreat 2025 yang berlangsung di Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu (26/4).



3

Kita tidak harus hanya mengetahui hal badil, hanya mengetahui hal meslu, hanya mengetahui hal susunan sesuatu Angkatan, tidak ini adalah harus satu pengetahuan yang multi kompleks. Satu pengetahuan multi kompleks, sebagai tadi kukatakan bahwa geopolitik pun sebenarnya adalah Kumpulan daripada pengetahuan-pengetahuan

Presiden Soekarno

Disampaikan pada peresmian Lemhannas RI
 yang memberikan kuliah geopolitik kepada
 para perwira Angkatan (KRA) I
 Mei 1965 di Istana Negara



4 Upacara Serah Terima Jabatan Inspektur, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Eselon II dan III, serta Pelepasan Pejabat Eselon I dan II Lemhannas RI pada Senin, (5/5).



5 Lemhannas RI menerima konsep hasil pemeriksaan laporan keuangan T.A. 2024 dari BPK pada taklimat akhir pemeriksaan, Selasa, 9/20/05).

6 Audiensi dari National Defence University (NDU) Pakistan di Ruang Tamu Gubernur, pada Senin (5/5)



7 Orasi ilmiah Gubernur Lemhannas RI pada peringatan 52 tahun berdirinya Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung pada Selasa (03/06).

8 Gebyar Wawasan Kebangsaan dengan tema Membangun Kemandirian Bangsa di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Global pada Senin (30/06)

9 Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. memberikan pembekalan pada Retret Kepala Daerah Gelombang II pada Senin (23/06)





SELAMAT MEMPERINGATI
**HARI KEBANGKITAN
NASIONAL**

20 MEI 2025





SELAMAT HARI LAHIR
PANCASILA

1 JUNI 2025

